

Skripsi

**DIFUSI INOVASI DESA TERPADU MANDIRI  
(STUDI KASUS: DESA TERPADU MANDIRI  
DI KABUPATEN LUWU UTARA)**

Disusun dan diusulkan oleh

**FERA JULIANA FAJAR**

Nomor Stambuk : 10561 05073 14



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2019**

DIFUSI INOVASI DESA MANDIRI TERPADU  
(STUDI KASUS: DESA MANDIRI TERPADU DI KABUPATEN  
LUWU UTARA)

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

FERA JULIANA FAJAR

Nomor Stambuk: 10561 05073 14

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2019

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Difusi Inovasi Desa Mandiri Terpadu (Studi Kasus:  
Desa Mandiri Terpadu Di Kabupaten Luwu Utara)  
Nama Mahasiswa : Fera Juliana Fajar  
Stambuk : 10561.05073 14  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

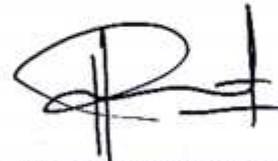
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si

Pembimbing II



Dr. Hj. Rulinawati Kasmad, M.Si

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ikhvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara



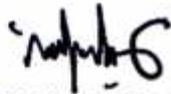
Nasrul Haq, S.Sos., M.PA

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0007/FSP/A.1-VIII/II/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ( S.1 ) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019.

## TIM PENILAI

**Ketua**



**Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si**

**Sekretaris**



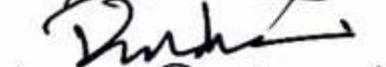
**Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si**

## Penguji

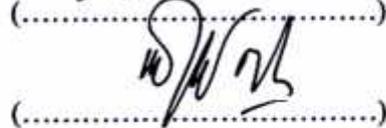
1. Dr. H. Mappamiring, M.Si (ketua)



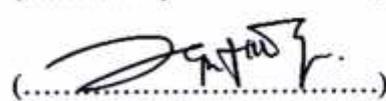
2. Dr. A. Rosdianti Razak, M,Si



3. Dr. Sudarmi, M.Si



4. Haerana, S.Sos M.Pd



## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Fera Juliana Fajar

Nomor Stambuk : 10561 05073 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/ dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 14 Februari 2019

Yang menyatakan

Fera Juliana Fajar

## ABSTRAK

**Fera Juliana Fajar. Difusi Inovasi Desa Mandiri Terpadu (Studi Kasus: Desa Mandiri Terpadu Di Kabupaten Luwu Utara** (dibimbing langsung oleh Andi Rosdianti Razak dan Rulinawaty Kasmad)

Difusi inovasi merupakan sebuah program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan perekonomian serta pendidikan di desa yang ada di kabupaten Luwu utara dengan menggunakan teori difusi inovasi dengan indikator Inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial . Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk menjelaskan dan menggambarkan tentang Difusi inovasi Desa Mandiri Terpadu di Kabupaten Luwu Utara.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (menjelaskan kondisi objek dengan cara-cara ilmiah) dengan informan sebanyak 12 (Dua belas) orang yang dipilih berdasarkan pandangan dari penulis bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan dan informasi mengenai masalah yang diteliti, antara alin: Sekertaris Daerah Luwu Utara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat Bone-Bone dan Camat Sukamaju, Kepala desa Sukaraya, Kepala Desa Wonokerto dan Masyarakat. Data yang yang dikumpulkan dengan menggunakan instrumen antara lain, observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan hasil wawancara terhadap informan.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa program desa mandiri terpadu masih belum berjalan dengan signifikan dan masih membutuhkan pembinaan kepada masyarakat akan program desa mandiri terpadu, dan kordinasi antar pemerintah dalam penanganan program desa mandiri terpadu.

*Kata Kunci : inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, sistem sosial.*

## KATA PENGANTAR



*“Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang”*

*Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Difusi Inovasi Desa Mandiri Terpadu (Studi Kasus: Desa Mandiri Terpadu Di Kabupaten Luwu Utara”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibunda Dr. Hj. Andi Rosdianti Razak selaku pembimbing I dan Ibunda Dr. Hj. Rulinawati Kasmad S.Sos M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Kakanda Nasrul Haq, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Fajar Yande Siwa S.E dan ibunda Dra. Erna Mustafa yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, mengarahkan, dan senantiasa mendo'akan serta memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi, nasehat serta pengorbanan yang tak terhingga dalam melalui hari demi hari dalam kehidupan ini.
5. Buat saudara-saudaraku tercinta Muhammad Fahmi Fajar, Muhammad Fadil Fajar, dan Farah Juliani Fajar yang senantiasa memberikan bantuan yang tiada ternilai baik moral maupun materi kepada penulis.
6. Segenap Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah sudi berbagi ilmunya kepada penulis selama ini.
7. Buat teman-teman seperjuangan di jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 014, penulis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan pengertiannya selama ini yang telah banyak membantu, memberi saran, dukungan dan motivasi kepada penulis. Reski Devi S.Sos, Andi Annisa As, Dian Ayu Lestari S.Sos, Siti Aulia Rahma, Asriayu Mursal S.Sos, Musdalifah S.Sos, Selviana Arsyad S.Sos, Sarmila S.Sos, Mentari Nadila Sari, Siti Hutami Sudirman S.Sos, Dian Lestari S.Sos, Yusparandi, Nurul Akbar Syarif, Erwin, dan teman-teman saya Clara Zeniche Leoni dan Eka Maulana ahmad yang membantu penulis dalam penelitian serta yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu yang setia menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 3 Februari 2019

Penulis,

Fera Juliana Fajar

## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i
Lembar pengesahan .....	ii
Halaman Pernyataan keaslian karya ilmiah .....	iii
Abstrak .....	iv
Kata pengantar .....	vi
Daftar Gambar.....	ix
Daftar tabel.....	xi
Daftar isi .....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik .....	7
1. Konsep dan Lingkup Kebijakan .....	8
2. Pendekatan Studi Kebijakan Publik.....	9
3. Proses kebijakan Publik .....	9
4. Inovasi Kebijakan .....	10
B. Inovasi .....	10
1. Tipologi Inovasi .....	11
2. Level Inovasi .....	11
3. Kategori Inovasi .....	13
C. Difusi Inovasi .....	13
1. Empat Elemen Utama Dalam Difusi Inovasi.....	14
D. Desa Mandiri Terpadu .....	24
1. Perkembangan konsep pembangunan desa mandiri terpadu.	25
2. Desa mandiri terpadu di luwu utara.....	28
E. Kerangka Pikir .....	29
F. Fokus penelitian.....	30
G. Deskripsi penelitian.....	30

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Informan Penelitian .....	32
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Keabsahan Data .....	35

### BAB IV HASIL

A. Deskripsi dan Objek Penelitian	
1. Letak Geografis dan Kondisi Umum Kabupaten Luwu Utara .....	37
2. Gambaran Umum Desa Wonokerjo .....	38
3. Gambaran Umum Desa Sukaraya.....	41
B. Difusi Inovasi Desa Terpadu Mandiri (Studi Kasus: Desa Terpadu Mandiri Di Kabupaten Luwu Utara)	
1. Inovasi .....	45
2. Saluran Komunikasi .....	58
3. Jangka Waktu .....	63
4. Sistem Sosial.....	66

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

DAFTAR PUSTAKA .....	74
----------------------	----

## DAFTAR TABEL

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
2.1	Informan Penelitian	35
2.2	Reduksi data indikator inovasi	48
2.3	Reduksi data indikator saluran komunikasi	61
2.4	Reduksi data indikator jangka waktu	66
2.5	Reduksi data indikator sistem sosial	70

## DAFTAR GAMBAR

<i>Nomor</i>	<i>Teks</i>	<i>Halaman</i>
1.1	Penghambat Inovasi	21
1.2	Bagan Kerangka Pikir	30
1.3	Struktur Organisasi desa wonokerto	42
1.4	Struktur organisasi desa sukaraya	46

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan publik adalah jalan dimana untuk mencapai sebuah tujuan yang dicita-citakan secara bersama-sama, kebijakan publik merupakan keputusan dari pemerintah untuk dikerjakan ataupun hanya dibiarkan saja oleh para birokrat yang bertugas untuk menjalankannya. Dalam hal ini juga kebijakan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada masyarakat baik itu secara keseluruhan maupun terhadap golongan dan kelompok tertentu yang membutuhkan sebuah kebijakan ataupun memecahkan masalah yang ada pada masyarakat.

Adapun dalam sebuah kebijakan publik, pemerintah tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan secara bersama, namun pemerintah juga harus membuat sebuah kebijakan yang baru, pemerintah dituntut dapat melakukan inovasi-inovasi pada kebijakannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik serta menggunakan metode yang baru pada kebijakannya. Inovasi tersebut merupakan sebuah gagasan, ide yang baru dilakukan dalam pemerintahan, baik itu baru diciptakan maupun hasil adopsi dari sebuah kebijakan yang telah ada namun, baru akan diterapkan pada pemerintah atau birokrasi yang belum pernah menerapkannya.

Semisalnya dengan difusi inovasi yang merupakan sebuah penggabungan dari dua kata yang memunculkan arti baru, dalam kamus besar bahasa indonesia difusi adalah percampuran suatu gas atau benda cair di luar daya mekanik, penyebaran atau merembeskan sesuatu seperti (kebudayaan, teknologi,

ide) dari satu pihak ke pihak lainnya, penghamburan, pemencaran, pengaruh migrasi dan pengalihan pranata budaya melalui batas-batas bahasa, khususnya inovasi dan peminjaman. Namun dalam hal ini difusi di artikan sebuah perubahan yang ada pada sebuah sosial budaya, baik itu perubahannya dalam struktur maupun fungsi pada sebuah sistem, tanpa terlepas dari inovasi, difusi merupakan proses di adopsinya sebuah inovasi ke dalam sebuah kelompok sistem sosial budaya Sedangkan inovasi adalah sebuah hal baru baik secara praktik maupun teoritik atau objek baru yang di anggap oleh manusia. (Fahrul Rizal:2012)

Oleh karena itu difusi inovasi ini di adopsi kedalam sebuah kelompok masyarakat, dalam hal megadopsi hal baru bagi sebuah kelompok tentunya tidak mudah. Setelah mendengarkan atau mempelajari sebuah inovasi ada kelompok yang dapat dengan mudah mengadopsi inovasi tersebut namun, ada juga kelompok yang membutuhkan waktu dalam mengadopsi. Inovasi ini juga merupakan sebuah perubahan untuk menjadi lebih baik di sengaja maupun secara kebetulan. Manfaat inovasi yakni untuk mengembangkan sebuah kebijakan yang lama dan tidak memiliki perubahan di masyarakat. (soetomo:2013)

Dengan adanya inovasi ini kebijakan yang telah ada walaupun bentuknya sudah lama tetapi, dengan inovasi kebijakan yang lama tersebut menjadi sebuah hal baru dan tentunya akan memiliki hasil yang berbeda. Inovasi kebijakan telah menjadi keharusan pada pemerintah untuk membuat sebuah terobosan, dengan adanya inovasi kebijakan maka kebijakan publik yang telah ada namun tidak memiliki banyak perubahan dan hasil yang tidak signifikan maka dengan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun tidak memiliki banyak perubahan

tentunya akan membuat hasil yang berbeda dengan kebijakan sebelum dilakukannya inovasi tersebut.

Berdasarkan penelitian oleh Agus Mulyono : 2008 tentang Partisipasi Masyarakat Pada program desa terpadu mandiri pangan desa di Muntuk Kabupaten Bantul, dengan sebuah program yang akan mengentaskan kemiskinan pangan pada daerahnya, dan berdasarkan hal tersebut menjadi rujukan pada penelitian program pengentasan kemiskinan dengan program desa terpadu mandiri di Kabupaten Luwu Utara, pemerintah kabupaten luwu utara melakukan sebuah inovasi kebijakan, yakni dengan mengadopsi sebuah program desa terpadu mandiri kemudian program tersebut menjadi kebijakan baru yang ada di kabupaten luwu utara.

Inovasi tersebut dilakukan karena terinspirasi pada sebuah gerakan yang di sebut dengan *Semaul undong* adalah sebuah gerakan pengentasan kemiskinan di Korea Selatan dan desa menjadi motor penggerak dari program tersebut, dan berdasarkan penelitian sebelumnya tentang desa terpadu mandiri Oleh karena itu pemerintah kabupaten Luwu Utara menetapkan beberapa desa sebagai *pilot project*. Berdasarkan surat edaran yang di keluarkan oleh pemerintah kabupaten luwu utara *No: 50/120/Pem-MM-Bappeda/2017 Perihal: Penyampaian tentang Paelop Proyek Desa Mandiri Terpadu (Desa Sukaraya Kecamatan Bone-Bone, Desa Wonokerjo Kecamatan Sukamaju, Desa Mario Kecamatan Baebunta.)*

Namun dalam sebuah inovasi yang dibuat oleh pemerintah tentunya akan menghadapi beberapa masalah yang membutuhkan penyelesaian secepatnya berdasarkan penelitian sebelumnya dalam pembangunan desa terpadu mandiri.

Dalam hal ini kebijakan pemerintah melakukan adopsi program kerja yang bukan berasal dari Indonesia, melainkan negara lain. Pemerintah yakni mengabaikan konteks lokal desa dan lebih cenderung menempatkan masyarakat desa sebagai objek kebijakan pemerintah. Indonesia memiliki ribuan desa yang pastinya memiliki berbagai budaya dan kultur yang berbeda. Dengan melakukan tindakan tanpa berdasarkan konteks lokal tentunya masyarakat akan semakin bergantung kepada pemerintah, pengelolaan desa terpadu mandiri tersebut akan menimbulkan ketergantungan masyarakat kepada pemerintah kemudian salah satu tujuan dibentuknya desa terpadu mandiri dalam memandirikan desanya akan semakin sulit untuk dilaksanakan. (Soetomo:2013)

Demikian dengan sumber daya yang belum terkelola secara maksimal menjadi masalah baik itu dalam sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya finansial yang masih belum terkelola secara benar. Serta juga kurangnya kesiapan pemerintah daerah terhadap sarana prasarana yang akan digunakan sebagai media dalam proses dilaksanakannya inovasi yang dibuat oleh pemerintah. Setelah melihat keterkaitan antara difusi inovasi dan kebijakan desa terpadu mandiri di kabupaten Luwu utara oleh sebab itu berkaitan dengan pemikiran dari Everett M Rogers dalam bukunya *Difussion of innovation (1995)* dalam proses difusi inovasi ada empat elemen pokok yaitu: 1) Inovasi. 2) Saluran komunikasi. 3) Jangka waktu 4) Sistem sosial.

Dengan adanya inovasi kebijakan desa terpadu mandiri ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk masyarakat desa dan terciptanya kesejahteraan masyarakat, serta pembangunan yang semakin membaik khususnya di bidang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang unggul dan meningkatnya mutu pendidikan. Oleh sebab itu untuk mengetahui secara

mendalam seperti apa inovasi yang pemerintah lakukan peneliti mengangkat judul **Difusi Inovasi Desa Terpadu (Studi Kasus: Kebijakan Desa Terpadu Mandiri Di Kabupaten Luwu Utara)**

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Inovasi pada Kebijakan Desa Terpadu Mandiri di Kabupaten Luwu Utara?
2. Bagaimana Saluran komunikasi pada Kebijakan Desa Terpadu Mandiri di Kabupaten Luwu Utara?
3. Bagaimana Jangka Waktu pada Kebijakan Desa Terpadu Mandiri di Kabupaten Luwu Utara ?
4. Bagaimana Sistem Sosial pada Kebijakan Desa Terpadu Mandiri di Kabupaten Luwu Utara ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebelumnya dalam hal ini tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Inovasi pada kebijakan desa terpadu mandiri di kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui Saluran Komunikasi pada kebijakan desa terpadu mandiri di kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui jangka waktu pada kebijakan desa terpadu mandiri di kabupaten Luwu Utara.

4. Untuk mengetahui sistem sosial pada kebijakan desa terpadu mandiri di kabupaten Luwu Utara.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini semoga dapat memberikan pelajaran dalam aspek teoritis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu administrasi, khususnya dibidang kebijakan publik, melalui melalui pendekatan dan beberapa metode dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek implementasi program desa terpadu mandiri di desa Sukaraya kabupaten Luwu Utara.

1. Secara praktis
  - a. Hasil penelitian ini juga diharapkan sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya administrasi untuk terfokus pada implementasi program kerja desa mandiri terpadu di desa sukaraya kabupaten luwu utara.
  - b. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan dalam membuat sebuah program kerja desa mandiri terpadu yang baik untuk masyarakat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kebijakan Publik**

Secara harfiah ilmu kebijaksanaan adalah arti dari kata *policy science* (Said Zainal:2004). Beberapa penulis besar yakni, Lee Friedman Charles Jones, William Dunn dan yang beberapa penulis lainnya, dengan istilah *public policy analysis* dan *public policy* memiliki arti yang hampir sama. Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang merupakan arti dari kata *policy* biasanya dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, karena pemerintah adalah yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat untuk kepentingan umum.

Kebijakan publik di defenisikan sebagai rancangan, kegiatan, peristiwa, keputusan, tindakan yang diambil oleh pemerintah merupakan sebagai orang yang berhak mengambil keputusan dalam segala kondisi yang dihadapi. Menurut Thoha (Ramdhan & Rhamadani : 2017) kebijakan publik memiliki dua aspek yakni:

1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Oleh karena itu, kebijakan merupakan sebuah hasil dari pemerintah yang dibuat dan dirumuskan berdasarkan dari peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. hal tersebut dapat tumbuh dalam praktik kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

2. Kebijakan adalah suatu respon terhadap peristiwa yang terjadi, baik dalam menciptakan keselarasan dari pihak yang memiliki konflik, maupun dalam menciptakan insentif terhadap 7 bersama bagi para pihak yang diperlakukan tidak sesuai atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian berdasarkan hal telah dikemukakan oleh Thoha dapat disimpulkan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang terarah dan secara sadar dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan semua orang yang berkepentingan dalam bidangnya masing-masing dalam mencapai tujuan yang di inginkan.

### **1. Konsep dan Lingkup Kebijakan Publik**

Kebijakan publik menurut Thomas R.Dye (Subarsono: 2010) apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whartever goverment choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Defenisi kebijakan publik dari Thomas R.Dye tersebut mengandung makna yakni, (a) kebijakan publik dalam hal ini dibuat oleh pemerintah, bukan organisasi maupun swasta; (b) kebijakan berkaitan dengan pilihan yang harus dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. kebijakan pemerintah untuk tidak membuat sebuah hal baru atau tetap pada statusquo. Lingkup kebijakan publik merupakan hal yang sangat luas karena menjangkau berbagai bidang dan sektor pembangunan, seperti pada kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan beberapa bidang lainnya. Di samping itu

juga, dapat dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik juga bisa bersifat nasional, regional, maupun, lokal. Seperti halnya undang-undang dan peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten/kota, serta keputusan Bupati/ walikota.

## **2. Pendekatan Studi Kebijakan Publik**

Dalam studi kebijakan terdapat pendekatan, yakni : pertama dikenal sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*), dan yang kedua sebagai kebijakan publik politik (*political public policy*). (Subarsono: 2010). Pada pendekatan yang pertama, dalam kajian analisis kebijakan lebih fokus pada studi membuat keputusan (*decision making*) dan untuk menetapkan kebijakan (*policy formation*) dengan menggunakan model statistik dan matematika canggih. Sedangkan pendekatan yang kedua, lebih cenderung pada hasil dan *outcome* dari kebijakan publik dari pada metode statistik, dengan melihat hubungan politik sebagai faktor yang menentukan berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan.

## **3. Proses Kebijakan Publik**

Proses analisis kebijakan adalah serangkaian aktivitas pembelajaran yang dilakukan dalam kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut terlihat pada serangkaian kegiatan yang mengenai penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan. Sedangkan perumusan masalah, forecasting, rekomendasi, kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat pembelajaran.

#### 4. Inovasi Kebijakan

Inovasi adalah merupakan ide, gagasan, atau suatu hal yang baru yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu produk, pelayanan, teknologi yang baru ditemukan dan belum pernah ada sebelumnya dikatakan sebagai inovasi, sedangkan kebijakan yakni sebuah wewenang yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu dijalankan atau tidak dijalankan merupakan sebuah kebijakan. Secara konseptual inovasi kebijakan terbagi atas beberapa (Sururi : 2017). Yang pertama *a policy innovation : new policy direction and initiative* yang berarti sebuah inisiatif dan arah kebijakan yang baru atau apapun yang akan dikeluarkan pada kebijakan selanjutnya harus bersifat baru dan belum digunakan sebelumnya. Dan yang kedua yakni *innovation in the policy making proses* yang artinya inovasi menjadi sebuah fokus dan inovasi dapat mempengaruhi proses pembuatan dan perumusan kebijakan.

#### B. INOVASI

Inovasi yakni memperkenalkan sebuah gagasan baru, objek baru, pelayanan dan cara baru yang lebih bermanfaat. *Amabile et al. (1996)* mendefinisikan inovasi yang berhubungan dengan kreativitas adalah inovasi *.innovation* dari kata *to innovate* yang berarti membuat perubahan atau memperkenalkan hal yang baru. Inovasi dapat di golongan juga atas inovasi besar dan inovasi kecil-kecil. Inovasi juga tidak harus mahal, inovasi itu dapat dilakukan oleh siapa, kapan, dimana saja. Inovasi dapat menjadi positif atau negatif, inovasi positif di artikan sebagai proses dalam perubahan terhadap sesuatu hal yang telah mampu memperkenalkan hal yang baru memberikan nilai tambah pelanggan. Inovasi negatif mengakibatkan pelanggan enggan untuk

menggunakan produk dan jasa karena tidak memiliki nilai tambah serta merusak cita rasa dan kepercayaan.

Secara khusus inovasi dalam lembaga publik bisa di definisikan sebagai upaya membawa ide-ide baru pada implementasi, ciri-cirinya adanya perubahan pada langkah yang cukup besar, berlangsung lama dan berskala cukup besar, berlangsung lama dan berskala umum sehingga proses implementasinya memiliki dampak cukup besar terhadap perubahan organisasi dan tata hubungan organisasi.

### **1. Tipologi Inovasi**

Inovasi merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk layanan dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil. Menurut Muluk ( dalam Eva Hany: 2015)

- a. Inovasi produk/ jasa pelayanan : perubahan bentuk dan desain produk atau layanan baru atau memperbaharui layanan yang sudah ada.
- b. Inovasi proses pelayanan : pembaharuan kualitas yang lebih lanjut dan mengacu pada penggabungan perubahan organisasi, prosedur, dan kebutuhan kebijakan untuk berinovasi.
- c. Inovasi metode pelayanan : perubahan baru pada hubungan pelanggan atau cara baru dalam hal memberikan pelayanan.
- d. Inovasi kebijakan : mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi baru.
- e. Inovasi sistem : metode yang diperbaharui dalam interaksi dengan aktor lain. dengan adanya perubahan dalam tata kelola pemerintahan.

### **2. Level Inovasi**

Aspek penting lain pada kajian inovasi yakni berkaitan dengan level inovasi yang mencerminkan jenisnya, serta dampak yang dari inovasi ini. dijelaskan oleh mulgan dan albury berentang mulai dari inkremental, radikal, sampai transformatif. ( Rina Mei Mirnasari 2013:78)

- a. Inovasi inkremental berarti inovasi yang membawa perubahan kecil pada proses atau layanan yang ada. Umumnya seberapa besar inovasi berada dalam level ini dan jarang sekali membawa perubahan terhadap struktur organisasi dan hubungan keorganisasian. Walaupun demikian inovasi inkremental berperan penting dalam pembaharuan kecil yang dapat diterapkan secara terus-menerus, dan mendukung rajutan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan lokal dan perorangan, serta mendukung nilai tambah uang (*value for money*)
- b. Inovasi radikal merupakan perubahan mendasar dalam pelayanan publik atau cara-cara pengenalan yang sama sekali baru dalam proses keorganisasian dan pelayanan. Inovasi ini sangat jarang dilakukan karena membutuhkan dukungan politik yang cukup besar. Dalam hal ini inovasi radikal diperuntukkan membawa perbaikan yang nyata dan baik dalam kinerja pelayanan publik dalam memenuhi harapan para pengguna layanan yang lama terabaikan.
- c. Inovasi transformatif atau sistemis akan membawa perubahan pada struktur kerja dan keorganisasian dengan mengubah semua bidang dan secara dramatis mengubah keorganisasian. Inovasi jenis ini membutuhkan jangka waktu yang lebih lama untuk memperoleh hasil

yang diinginkan dan membutuhkan perubahan mendasar dalam susunan sosial, budaya dan organisasi.

### 3. Kategori Inovasi

Terdapat dua kategori inovasi yang diungkapkan Muluk (dalam Eva Hany: 2015) yakni:

- a. *Sustaining Innovation* (inovasi terusan) : merupakan inovasi yang membawa perubahan baru namun dengan tetap berdasarkan diri pada kondisi pelayanan dan sistem yang telah berjalan atau produk yang sudah ada.
- b. *Discontinues innovation* (Inovasi terputus) : merupakan inovasi yang membawa perubahan yang sama sekali baru dan tidak lagi berdasarkan pada kondisi yang sudah ada sebelumnya.

### C. DIFUSI INOVASI

Difusi inovasi merupakan sebuah bagian dari inovasi kebijakan, difusi sendiri memiliki sebuah arti yakni, difusi adalah proses inovasi yang dikomunikasikan melalui saluran dari waktu ke waktu oleh anggota sistem sosial. Ini merupakan tipe khusus dalam komunikasi, dalam hal ini gagasan baru. Komunikasi adalah sebuah proses membuat peserta dan membagi informasi yang satu dengan yang lain. Untuk mencapai kerjasama. Definisi ini menyiratkan bahwa komunikasi adalah proses konvergensi ( atau perbedaan) sebagai dua atau lebih individu bertukar informasi untuk bergerak ke arah yang lain ( atau terpisah) dalam artian mereka memberikan kepada peristiwa tertentu. Kita berpikir komunikasi sebagai proses dua arah dalam konvergensi. Bukan satu arah garis sebuah tindakan dimana satu individu

berusaha mentransfer pesan untuk yang lain untuk mencapai hal tertentu (Rogers dan Kincaid, 1981)

Dalam garis konsep adalah manusia berkomunikasi mungkin akurat menjelaskan tindakan komunikasi atau tindakan yang terlibat dalam difusi. Seperti ketika agen perubahan mencari cara untuk membujuk klien untuk mengadopsi inovasi. Tetapi ketika kita melihat apa yang terjadi sebelum peristiwa itu, kita sadar bahwa bagian tersebut hanya satu bagian saja yang dari proses total yang mana informasi pertukaran antara dua individu, contohnya seorang klien mungkin datang ke agen perubahan dengan masalah dan inovasi diberikan semaksimal mungkin solusi yang dibutuhkan. Agen perubahan-klien mungkin interaksi berlanjut beberapa siklus, seperti pertukaran informasi.

Jadi difusi adalah tipe khusus dalam komunikasi melalui saluran tentang gagasan baru. Hal ini adalah gagasan dalam konten saluran memberikan difusi khususnya karakter. Difusi adalah semacam perubahan sosial, di definisikan sebagai proses yang mana dari alternatif terjadi dalam struktur dan fungsi dari sistem sosial.

### **1. Empat Elemen Utama dalam Difusi Inovasi**

Sebelumnya kita telah mendefinisikan difusi sebagai proses inovasi yang di komunikasikan melalui saluran dari waktu ke waktu oleh anggota sistem sosial. Ke empat elemen tersebut adalah *Inovasi*, *Saluran Komunikasi*, *Jangka Waktu*, dan *Sistem Sosial* menurut Everett M Roger dalam *Diffusion of innovation*. Elemen ini dapat di identifikasikan pada setiap penelitian difusi dan disetiap gerakan atau

kegiatan. Berikut merupakan urian dari ke empat elemen dalam difusi, yang merupakan gambaran dari sebuah konsep yang lebih rinci.

a. Inovasi

Inovasi adalah sebuah gagasan, praktik, atau objek yang di anggap baru oleh individu, atau unit adopsi yang lain. Itu sedikit penting, sejauh mana ke prihatinan tingkah laku manusia. Ada atau tidak gagasan yang baru objektif seperti yang di ukur dari selang waktu sejak pengguna pertama atau pemulihan. Yang dirasakan baru dari gagasan menentukan reaksi individu. Jika gagasan nampak baru untuk seorang individu, itu adalah sebuah inovasi.

Pembaharuan dalam sebuah inovasi tidak hanya membutuhkan keterlibatan pengetahuan yang baru. Seorang mungkin tahu tentang inovasi dalam suatu waktu tidak berkembang jauh atau tindakan yang tidak dapat tertatasi, maupun hanya adopsi atau mengabaikan pembaharuan dalam inovasi mungkin di katakan dalam istilah pengetahuan, rujukan atau adopsi pengambilan keputusan.

Rogers (dalam suwarno: 2008) mengemukakan lima karekteristik inovasi meliputi :

- 1) *Relative Advantage* ( Keuntungan Relatif), sebuah inovasi harus memiliki keunggulan tersendiri dan nilai yang lebih dibandingkan dengan sebelumnya. Selalu ada sebuah hal yang baru pada nilai lama yang melekat pada inovasi dan menjadi ciri khas yang membedakan dengan yang lainnya.

- 2) *Compability* ( Kesesuaian), inovasi juga sebaliknya memiliki sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang digantinya. Hal ini agar inovasi yang terdahulu tidak dibuang begitu saja, selain karena faktor biaya yang cukup banyak, namun pada inovasi yang lama juga menjadi bagian dari proses transisi yang dilakukan ke inovasi yang baru. Selain itu dapat mempermudah proses adaptasi yang dilakukan dan proses pembelajaran dalam inovasi itu secara lebih detail dan lebih cepat.
- 3) *Complexity* ( Kerumitan ), dengan sifatnya yang baru dimiliki, maka hal tersebut mempunyai tingkat kerumitan dan kesulitan boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Namun, karena inovasi menawarkan metode lebih baru dan lebih baik, oleh karena itu tingkat kerumitan ini pada dasarnya tidak menjadi masalah penting.
- 4) *Triability* ( kemungkinan dicoba ), inovasi hanya dapat diterima jika telah teruji dan terbukti mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi harus melewati fase "uji publik", dimana setiap orang dan setiap pihak memiliki kesempatan untuk menguji kualitas dari inovasi tersebut.
- 5) *Observability* ( kemudahan diamati ), pada inovasi juga harus dapat diamati, dari bagaimana ia bekerja dan menghasilkan hal yang lebih baik dari sebelumnya.

b. Saluran Komunikasi

Sebelumnya kita ketahui definisi komunikasi adalah proses dari membuat peserta dan membagi informasi dengan satu sama lain untuk saling memahami. Difusi adalah tipe tertentu komunikasi dalam isi pesan dengan gagasan baru. Esensi dari proses difusi adalah pertukaran informasi. Melalui komunikasi satu arah dengan gagasan baru untuk beberapa orang.

Pada bentuk paling mendasar melibatkan proses, 1) sebuah inovasi 2) sebuah individu atau unit lain dari adopsi yang memiliki pengetahuan inovasi atau pengalaman menggunakannya 3) individu yang lain yang tidak memiliki pengalaman dengan hal tersebut, dan 4) koneksi saluran komunikasi dua unit. Saluran komunikasi yang berarti mendapatkan pesan dari satu individu untuk yang lain. Sifat informasi- pertukaran hubungan antara sepasang individu menentukan kondisi sumber yang akan atau tidak akan mengirimkan inovasi untuk pengirim, dan akibat dari pengirim.

Komunikasi merupakan sebuah kebutuhan dasar seorang manusia yang sudah ada sejak manusia lahir ke dunia hingga manusia kembali ke penciptanya, komunikasi sebuah proses yang dilakukan oleh manusia selama kehidupannya, komunikasi ini tidak hanya bersifat individu melainkan komunikasi ini sangat beragam, baik itu komunikasi individu kepada kelompok, individu kepada organisasi.

#### c. Jangka Waktu

Jangka waktu adalah elemen ketiga dalam proses difusi. Banyak perilaku lain dalam penelitian tersebut dimensi waktu hanya hanya diabaikan. Inklusi dari jangka waktu adalah variabel dalam penelitian difusi salah satu kekuatan, tetapi

pengukuran dari dimensi waktu ( sering dengan cara mengingat responden) dimensi jangka waktu adalah dilibatkan dalam difusi (1) proses pengambilan keputusan dalam inovasi dari individu yang pertama melewati pengetahuan inovasi adopsi atau penolakan, (2) dalam inovasi dari seorang individu atau unit adopsi-relatif cepat/lambat dengan adopsi inovasi- dibandingkan dengan anggota sebuah sistem dan (3) dalam jaringan inovasi dari adopsi sistem, biasanya di ukur dengan berapa banyak anggota dalam sistem adopsi tersebut adopsi inovasi dan diberi jangka waktu.

Inovasi –proses pengambilan keputusan melalui proses individu (atau keputusan-pembuatan unit) melewati dari pengetahuan pertama dari inovasi untuk membentuk perilaku inovasi. Untuk keputusan yang di adopsi atau di abaikan.

d. *Sistem Sosial.*

Defenisi sistem sosial adalah sebuah hal yang saling terkait pada unit, di dalamnya memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama. Anggota atau unit dari sistem sosial mungkin perorangan, kelompok informal, organisasi, dan subsistem.

Terjadi difusi dengan sosial sistem, struktur sosial dalam sistem mempengaruhi difusi inovasi dalam beberapa cara. Sistem sosial merupakan batas dengan difusi inovasi. Kita sepakat dengan bagaimana struktur sistem sosial mempengaruhi difusi, efeknya norma pada difusi, peran pemimpin opini dan agen perubahan. Tipe inovasi-keputusan, dan konsikueni dari inovasi, masalah ini melibatkan hubungan antara sistem sosial dan proses terjadinya difusi dengan itu.

Anggota sistem sosial ini dapat dibagi menjadi beberapa kelompok yakni kelompok yang menerima inovasi, dan sesuai dengan seberapa besar inovasi yang dimilikinya.

Pada struktur sosial memiliki sistem unit dengan pola tersendiri, struktur pada sistem sosial memberikan dampak yakni adanya suatu keteraturan dan juga stabilitas pada perilaku seorang dalam sistem sosial tersebut, dalam hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial memiliki hubungan-hubungan pada setiap anggota yang ada pada sistem sosial, kita dapat melihat pada struktur yang ada pada sebuah organisasi ataupun pada struktur sosial yang ada pada masyarakat tertentu, hal tersebut juga dapat menghambat difusi inovasi pada sistem sosial. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rogers dan Kincaid yang telah melakukan penelitian, yang mana hasil tersebut mengatakan bahwa di dalam sebuah adopsi terdapat karakteristik individu yang mempengaruhi inovasi dan juga sistem sosial.

Yang pertama, Norma sistem (*system norms*) yakni merupakan pola perilaku yang dapat diterima oleh semua anggota sistem sosial tersebut yang berfungsi sebagai pedoman bagi semua anggotanya, sistem norma juga dapat menjadi faktor penghambat dalam hal penerimaan ide, gagasan-gagasan baru, selanjutnya sama halnya dengan derajat kesesuaian (*compatibility*) yang merupakan sebuah nilai yang terdapat dalam sebuah sistem masyarakat, kesesuaian suatu inovasi dengan kepercayaan atau nilai-nilai yang ada dengan masyarakat baik yang ada pada individu perseorangan maupun kelompok masyarakat sangat berpengaruh terhadap adopsi pada suatu inovasi.

Kemudian, Peran pemimpin ( *opinion leaders*), juga memiliki pengaruh karena peran pemimpin atau orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan mempengaruhi tindakan orang lain dalam sebuah sistem sosial. Pada saat ini peran pemimpin mempunyai dampak yang cukup besar karena dapat menjadi pengaruh penentu pendukung ataupun sebaliknya pada proses inovasi. Dan yang terakhir adalah agen perubahan (*change agent*), agen perubahan juga merupakan salah satu elemen penting dalam sistem sosial yakni agen perubahan merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mempengaruhi orang lain untuk menerima inovasi-inovasi baru, agen perubahan hampir sama dengan peran pemimpin, namun agen perubahan lebih bersifat formal, dan langsung dari klien kepada masyarakat yang berada dalam sistem sosialnya. Agen perubahan ini adalah orang-orang yang ahli dibidangnya dan telah melalui pelatihan-pelatihan, serta pendidikan yang bersifat formal. Fungsi dari sebuah agen perubahan yaitu menghubungkan dua atau lebih sistem sosial.

kelompok-kelompok adopter (penerima inovasi) yang sesuai dengan tingkat inovasi yang dimilikinya, adapun pengelompokan berdasarkan kurva adopsi, yang telah diuji oleh Rogers (Hikmah:2012). Gambaran pada pengelompokan adopter dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) *Innovators* : sekitar 2,5% individu yang pertama kali melakukan adopsi pada inovasi tersebut. Cirinya: berani mengambil resiko, mobile, cerdas, kemampuan ekonomi cukup tinggi.

- 2) *Early Adopters* (perintis/pelopop) : 13,5% yang menjadi orang yang menjalankan inovasi yang diterima. Cirinya : para teladan (pemuka pendapat), orang yang dihormati, dan memiliki akses yang cukup tinggi.
- 3) *Early Majority* ( pengikut dini) : 34% yang menjadi pengikut awal. Cirinya : penuh pertimbangan, interaksi internal tinggi.
- 4) *Late Majority* ( pengikut akhir ) : 34% menjadi orang terakhir dalam penerimaan inovasi. Ciri khasnya : skeptis, menerima karena tekanan ekonomi atau tekanan sosial, serta terlalu hati-hati.
- 5) *Laggards* ( kelompok kolot/Tradisional ) : 16% terakhir adalah para kaum kolot/ tradisional lainnya. Cirinya : tradisional, terisolasi, wawasan terbatas, bukan *opinion leaders*, sumberdaya terbatas.

#### **e. Proses Adopsi Inovasi**

Proses adopsi inovasi adalah sebuah proses tahap pengambilan keputusan, Rogers dan Shoemaker (1971) mendefinisikan tentang proses pengambilan keputusan untuk melakukan adopsi inovasi. Dalam hal ini proses inovasi memerlukan mental dan konfirmasi untuk setiap keputusan yang akan diambil oleh individu yang akan mengadopsi. Inovasi yang baru tentunya akan mengubah sebuah sistem sosial, namun tergantung bagaimana cara masyarakat akan mengadopsi inovasi tersebut. Menerima ataupun menolak inovasi tersebut merupakan sebuah keputusan yang telah diambil oleh seorang individu maupun masyarakat.

Adapun tahapan mengadopsi perilaku, ide, gagasan baru, menurut Rogers yaitu:

- a. Tahap *awareness* (kesadaran), yaitu tahap seorang tahu dan sadar terdapat suatu inovasi sehingga muncul adanya suatu kesadaran terhadap hal tersebut.
- b. Tahap *interest* (keinginan), yaitu tahap seorang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya tersebut sehingga ia mulai tertarik pada hal tersebut..
- c. Tahap *evaluation* (evaluasi), yaitu tahap seseorang membuat keputusan apakah ia akan menolak atau menerima hal yang ditawarkan sehingga pada saat itu ia mulai mengevaluasi.
- d. Tahap *trial* (mencoba), yaitu tahap dimana seorang melaksanakan sebuah keputusan yang telah diambil sehingga ia kemudian mencoba suatu perilaku yang baru.
- e. Tahap *adoption* (adopsi), yaitu dimana seseorang akan memastikan atau mengkonfirmasi keputusan yang diambilnya sehingga ia mulai mengadopsi perilaku tersebut.

Namun pada kenyataan yang ada di lapangan proses adopsi tersebut tidak serta merta berhenti begitu saja setelah adanya penerimaan ataupun penolakan. Kemudian hal ini berubah menjadi akibat dari sebuah pengaruh lingkungan penerimaan sebuah inovasi, oleh karena itu Rogers (1983) mengubah kembali teorinya tentang keputusan inovasi yaitu: *Knowledge* (pengetahuan), *persuasion* (persuasi), *desicion* (keputusan), *implementation* (pelaksanaan) dan *confirmation* (konfirmasi).

#### 1) Tahap Pengetahuan

Pada tahap ini, jika ada inovasi-inovasi yang baru harus disampaikan melalui media yang telah disediakan dalam saluran komunikasi, seperti media cetak, elektronik, maupun informasi yang beredar dalam masyarakat. Tahapan ini juga dipengaruhi oleh beberapa karakteristik dalam pengambilan keputusan, sosial ekonomi dan nilai-nilai .

2) Tahap Persuasi

Pada tahapan ini biasanya hanya memikirkan siapa yang akan menggunakan inovasi tersebut, inovasi ini berkaitan dengan karakteristik inovasi itu sendiri, seperti: kelebihan inovasi, tingkat keserasian, kompleksitas, dapat dicoba dan dapat dilihat.

3) Tahap Pengambilan Keputusan

Pada tahapan ini adalah proses dimana proses mempertimbangkan sebuah inovasi, dengan mempertimbangkan besar kecil keuntungan yang akan terjadi pada keputusan tersebut, diambil atau tidaknya sebuah inovasi tersebut merupakan tahap dari pengambilan keputusan ini.

4) Tahap Implementasi

Tahapan ini yakni dimana para individu mengerjakan tugasnya masing-masing, dalam menentukan kegunaan inovasi, sembari mengumpulkan informasi yang dibutuhkan kedepannya.

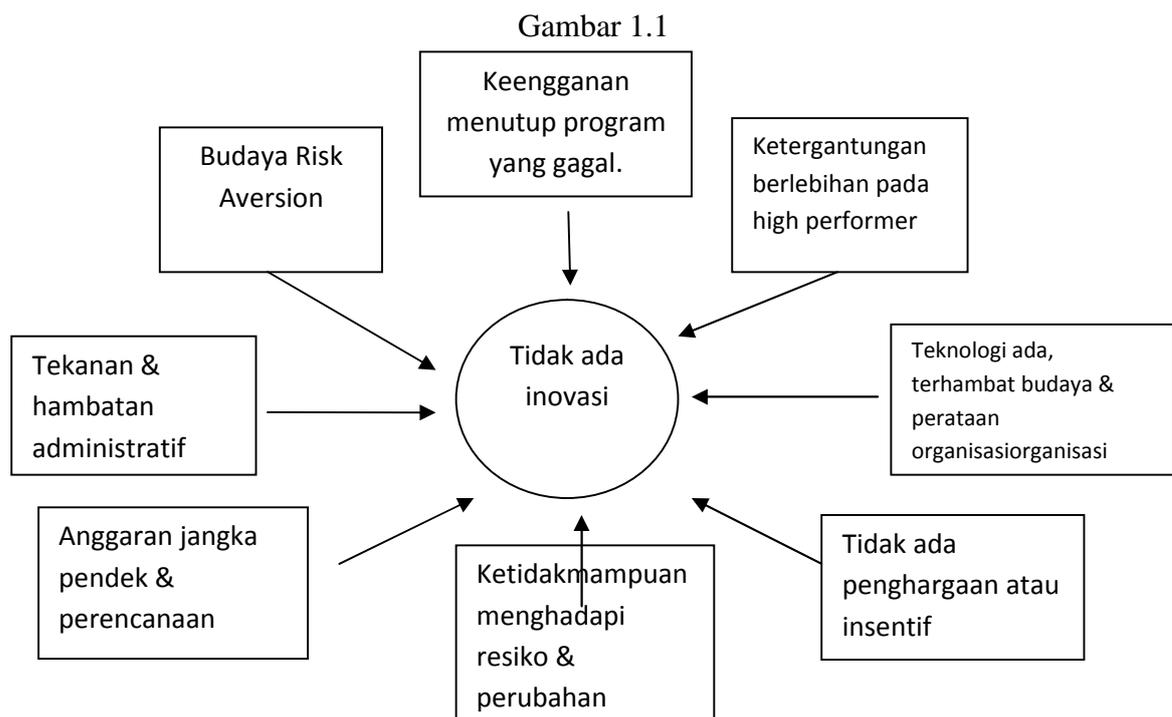
5) Tahap Konfirmasi

Tahap ini setelah semua proses yang dilalui sebelumnya, seseorang akan membuat pembenaran atas keputusan yang telah diambil, kata lain

memperjelas apakah inovasi tersebut akan digunakan maupun tidak digunakan.

#### f. Faktor Penghambat Inovasi

Inovasi tidak selamanya berjalan baik dan sesuai dengan rencana, banyak inovasi yang cukup memiliki kendala oleh berbagai faktor yang membuat sebuah inovasi tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya telah direncanakan. Adapun delapan jenis penghambat inovasi yang terdapat sebagai berikut;



#### D. DESA MANDIRI TERPADU

Pembangunan Desa Terpadu Mandiri adalah sebuah strategi pembangunan yang merupakan proses lebih lanjut dari strategi pembangunan desa. Dalam pembangunan desa dilakukan usaha yang cukup intensif dengan tujuan dan

kecendrungan memberikan fokus dan perhatian kepada kelompok ataupun daerah tertentu, yang melalui penyampaian pelayanan, serta bantuan dan informasi kepada masyarakat desa (Soetomo:2013). Dengan demikian, pada strategi ini lebih banyak memberikan perhatian pada proses penyampaian (*delivery*) dari pada mengembangkan kapasitas dan respon masyarakat. Karena masyarakat desa memiliki banyak aspek pada usaha pembangunan desa yang bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Jika usaha pembangunan tersebut untuk masing-masing aspek yang ditangani oleh instansi yang melakukan kegiatan di desa dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk menghindari kemiripan dan tumpang tindih serta untuk terwujudnya proses yang saling mendukung, maka perlukan suatu tindakan pendekatan yang dapat mengoordinasikan dan menyatukan program-program yang bersifat sektoral tersebut. Untuk maksud kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai *Integrated Rural Development* (Pembangunan Desa Terpadu).

Dalam pandangan ini Pembangunan Desa Terpadu Mandiri merupakan suatu strategi dalam mencapai tujuan melalui sinkronasi yang lebih baik dari berbagai aktivitas, mata rantai, usaha serta kordinasi yang efektif dari berbagai instansi terkait (Soetomo:160). Dari sumber yang sama juga disebutkan, bahwa Pembangunan Desa Terpadu Mandiri merupakan tema kegiatan yang melibatkan bukan saja perubahan fisik dan ekonomi, melainkan juga perubahan sosial psikologis. Disamping itu, program ini juga berisi muatan dan prosedur perubahan dalam organisasi sosial.

### **1. Perkembangan Konsep Pembangunan Desa Mandiri Terpadu**

Secara garis besar, tujuan pembangunan pada umumnya dan pembangunan masyarakat desa pada khususnya adalah peningkatan kesejahteraan atau

peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengertian taraf hidup masyarakat maupun kesejahteraan masyarakat mempunyai berbagai dimensi. Sementara pihak yang beranggapan bahwa dalam pengertian kesejahteraan yang penuh terkandung dimensi fisik, ekonomi, mental dan sosial. Dengan menggunakan ukuran relatif dapat dikatakan, bahwa kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat akan meningkat apabila semakin banyak kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi. Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan dapat juga diartikan sebagai suatu usaha untuk dapat memenuhi semakin banyak aspek kebutuhan tersebut, banyak pendapat yang mengatakan bahwa dimensi ekonomi memegang peranan yang cukup penting karena dapat menjadi sarana dan pendorong bagi pemenuhan dimensi yang lain. Oleh karena itu, persoalan pada proses pembangunan adalah hal yang utama termasuk pembangunan masyarakat yakni bagaimana mengupayakan terjadi peningkatan pendapatan masyarakat secara cepat, sehingga masyarakat akan lebih berpeluang untuk memenuhi semakin banyak kebutuhan-kebutuhannya.

Dengan menggunakan pendapat yang cukup berat bahwa mayoritas penduduk di negara-negara berkembang tinggal di desa dan mayoritas masyarakat desa yang bekerja di sektor pertanian, maka pendapatan masyarakat meningkat diperlukan peningkatan produktivitas pertanian. Pola pikir seperti itu juga banyak digunakan pada saat orang berusaha mencari sektor kunci dalam pelaksanaan pembangunan, dengan perhitungan bahwa apabila sektor kunci tersebut dapat dikembangkan akan memberikan pengaruh luas bagi perkembangan sektor-sektor lain. Ke dalam sektor kunci tersebut berbagai sumber daya baik itu internal maupun eksternal termasuk bantuan internasional yang lebih banyak disalurkan.

Baik *Schulzt* maupun *Johnson* dan *Mellor* ( Soetomo:165) sama-sama berpendapat bahwa pertanian adalah sektor kunci bagi kebanyakan negara-negara sedang berkembang, karena sektor pertanian dapat disebut sebagai mesin pertumbuhan baru dan mempunyai dampak yang luas dan menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian tersebut, terutama di daerah padat penduduknya dan perluasan lahan pertanian lebih terbatas, cara yang banyak dipilih adalah melalui perubahan dan pembaharuan dalam sistem usaha tani, melalui cara tersebut dilakukan berbagai usaha untuk memperkenalkan teknologi baru, cara kerja baru dan ide-ide baru dibidang pertanian. Pengenalan ide-ide baru, cara kerja baru, dan teknologi baru secara terprogram, terencana dan sistematis tersebut dimaksudkan agar perubahan dan pembaharuan dapat berjalan lebih cepat dan terarah. Usaha peningkatan taraf hidup melalui peningkatan produktivitas pertanian dalam bentuk revolusi hijau tersebut, memberikan kesan bahwa pembangunan masyarakat desa identik dengan pembangunan pertanian. Karena perubahan dan pembaharuan diharapkan terjadi melalui pengenalan dan kemudian penerapan ide-ide baru, cara kerja baru dan teknologi baru dibidang pertanian maka dalam pelaksanaannya program penyuluhan pertanian (*agricultural extention*) menjadi andalan utamanya, melalui program penyuluhan pertanian ini diharapkan pengenalan dan penerapan ide-ide baru dapat berlangsung lebih cepat dan terarah.

Dengan misi tersebut, maka dapat dimaklumi apabila petugas penyuluh pertanian lapangan, yang di indonesia dikenal sebagai PPL, merupakan ujung tombak terdepan dari program ini yang langsung berhadapan dan berhubungan

dengan petani. Dalam kenyataannya kemudian banyak negara-negara berkembang yang menggunakan program ini dalam rangka memacu produktivitas pertaniannya. Walaupun demikian, penerapan program ini di antara negara-negara sedang berkembang tersebut ditemukan adanya variasi.

Secara garis besar dikenal ada dua pola penyuluhan pertanian dikalangan negara-negara sedang berkembang yaitu pola Asia-Amerika latin dan pola Afrika (Soetomo:167). Dalam pola Asia-Amerika Latin yang sering juga disebut sebagai pola konvensional, kegiatan penyuluhan pertanian pada umumnya ditangani secara nasional dengan lingkup pelayanan meliputi seluruh wilayah negara dengan aneka ragam budi daya pertanian dan aneka ragam petani. Sedangkan dalam pola Afrika yang sering juga disebut sebagai pola berspesialisasi, kegiatan penyuluhan dengan maksud untuk memperkenalkan dan memperluas produksi pada umumnya dipilih budi daya tertentu, khusus dilaksanakan di daerah yang dinilai paling cocok dengan budi daya yang dimaksud.

## **2. Desa Mandiri Terpadu Di Luwu Utara**

Desa terpadu mandiri di kabupaten Luwu Utara merupakan sebuah kebijakan baru yang dicanangkan oleh pemerintah yang baru berjalan pada tahun 2017, berkaitan dengan kebijakan tersebut pemerintah hanya menggunakan tiga desa di kecamatan yang berbeda sebagai *pilot project* masing-masing desa tersebut adalah, Desa Sukaraya di kecamatan Bone-Bone, Desa Wonokerja di Kecamatan Sukamaju dan Desa Mario di Kecamatan Baebunta. Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah berharap peningkatan ekonomi, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada desa tersebut dapat meningkat dengan adanya pemberdayaan pada masing-masing desa yang telah di jadikan sebagai *pilot project*.

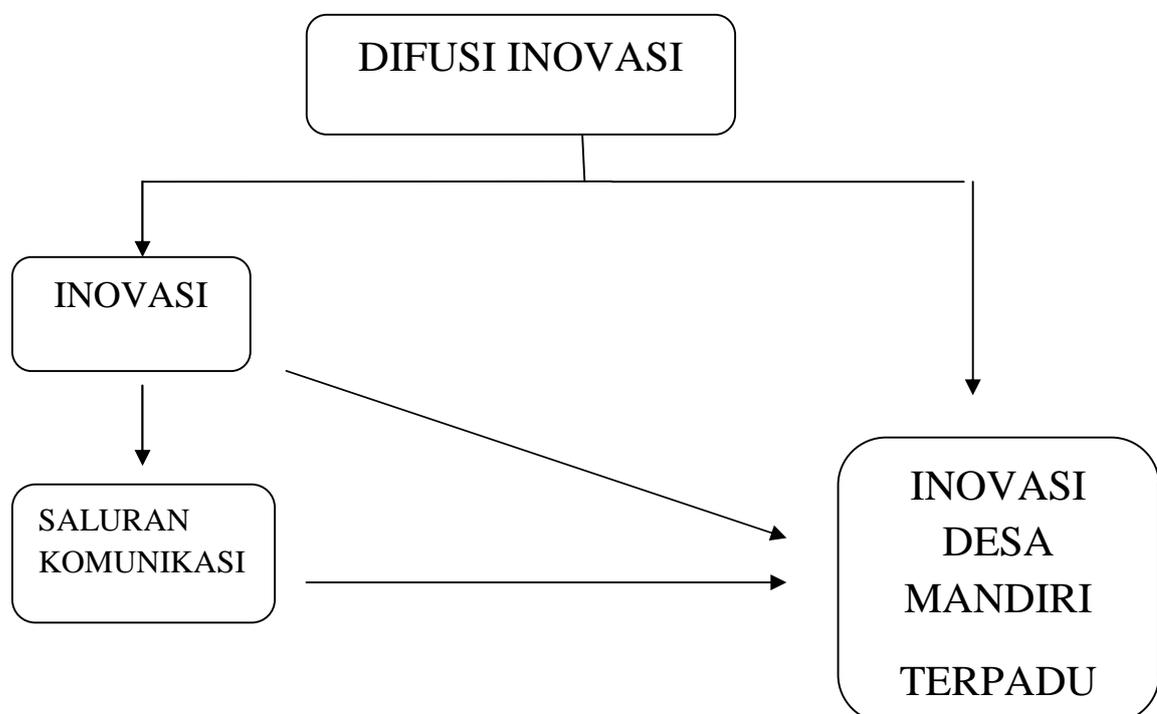
Adapun kondisi pada kebijakan tersebut yang baru berjalan sekitar satu tahun ini masih perlu banyak pembenahan, dan masih dalam tahap penyesuaian

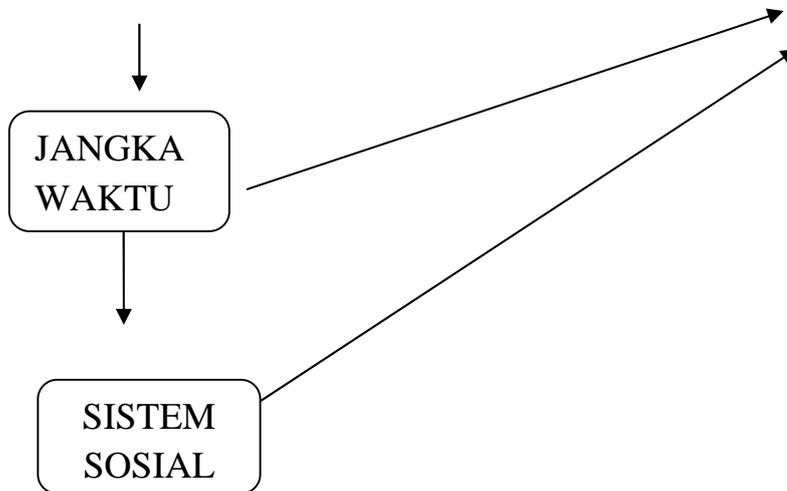
pada masing-masing desa tersebut, penyesuaian kepada masyarakat tentang kebijakan tersebut, pelatihan dan pendampingan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah desa baik itu sumberdaya yang dimiliki desa ataupun pelatihan pada masyarakat dan memperkenalkan kebijakan desa terpadu mandiri lebih dekat, walaupun tidak mudah dalam mendapatkan partisipasi masyarakat desa yang cenderung pasif namun pemerintah daerah mengupayakan agar kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas desa menjadi lebih baik dalam segala bidang.

### E. KERANGKA PIKIR

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan berujuk pada teori difusi inovasi yang di kemukakan oleh Everet M Rogers dalam *Difussion Innovation* (1995), yakni difusi inovasi memiliki empat acuan yakni, 1) inovasi, 2) Saluran Komunikasi 3) Jangka Waktu dan 4) Sistem sosial oleh sebab itu penulis mengemukakan kerangka konsep penelitian ini dapat di lihat dari bagan berikut ini yang menjadikan teori tersebut sebagai indikator pada penelitian ini bagaimana penerapan keempat idnikator tersebut dalam difusi inovasi pada kebijakan Desa Terpadu Mandiri di Kabupaten Luwu Utara.

Gambar 1.2





#### **F. FOKUS PENELITIAN**

Fokus penelitian ini yakni inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial yang ada pada kebijakan desa terpadu mandiri di kabupaten Luwu Utara.

#### **G. DESKRIPSI FOKUS PENELITIAN**

1. Difusi inovasi, yakni merupakan proses penyaluran inovasi pada sebuah kebijakan pemerintah yang sudah ada sebelumnya
2. Inovasi, adalah sebuah perubahan yang baru pada sebuah kebijakan, dimana inovasi tersebut merupakan adopsi kebijakan yang telah ada sebelumnya namun baru diterapkan pada daerah tertentu.
3. Saluran komunikasi, adalah proses dimana beberapa orang saling berbagi informasi atau bertukar informasi, dan memiliki koneksi antara satu unit dengan unit yang lainnya, baik itu dilakukan individu pada individu, individu dengan kelompok maupun individu dengan organisasi.

4. Jangka waktu, adalah proses-prose dalam pengambilan keputusan, baik itu penerimaan maupun penolakan, jangka waktu merupakan hal berpengaruh dalam pengambilan keputusan dalam hal pengadopsian sebuah inovasi.
5. Sistem sosial, adalah serangkaian bagaian pada difusi inovasi yang saling berhubungan dalam suatu upaya dalam memecahkan sebuah masalah individu dengan individu maupun individu dengan kelompok.
6. Inovasi Desa Terpadu Mandiri, yakni merupakan inovasi 1 pembangunan desa dalam meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN.**

##### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan. Dan penelitian ini berlangsung Desa Sukaraya Kecamatan Bone-Bone dan Desa Wonokerjo Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara, karena kedua desa tersebut merupakan desa yang termasuk kedalam *pilot project* Desa Terpadu Mandiri yang ditetapkan oleh pemerintah daerah

##### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif. Yang dimana jenis penelitian ini menjelaskan mengenai suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata, tulisan serta lisan dari pelaku yang dapat diamati. Adapun tipe penelitian ini adalah *fenomenologi*, yaitu suatu penelitian yang dilakukan melalui pemaparan dan pengalaman yang dialami oleh informan dengan didukung data kualitatif, dimana peneliti berusaha untuk mengungkapkan suatu fakta tertentu dan memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan dan permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan dilaksanakan agar dapat mendapatkan gambaran secara objektif mengenai difusi inovasi desa mandiri terpadu yang ada di kabupaten luwu utara. Sama halnya menurut Sugiyono (2003: 11) penelitian berdasarkan tingkat kejelasan dapat didefinisikan bahwasannya

Penelitian diskriptif merupakan penelitian yang dilakukan agar mengetahui seberapa besar nilai variabel mandiri, baik pada satu variabel atau mandiri tanpa membuat perbandingan, dan menghubungkan pada variabel yang lain.

### **C. Sumber Data**

Dalam hal ini sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Data primer ialah data yang didapatkan melalui hasil penelitian secara langsung kepada objek yang akan diteliti. Data primer ini didapatkan dengan hasil wawancara langsung terhadap responden atau pihak-pihak yang terkait ataupun melalui kuisioner yang diberikan yaitu berupa daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan program desa terpadu mandiri di desa sukaraya, kecamatan Bone-Bone kabupaten Luwu Utara.
2. Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sebuah pihak ke dua, ketiga dan seterusnya. Misalnya dari sebuah instansi ataupun organisasi yang bersangkutan, atau perorangan dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengalihnya, seperti data dokumentasi, data wawancara dengan masyarakat, foto-foto, buku dan lain-lain yang relevan dengan penelitian. Hal ini diperoleh dengan mencari dan mengumpulkan data dari informan baik itu secara tertulis ataupun gambar-gambar dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian.

### **D. Informan Penelitian**

Dalam desain penelitian deskriptif kualitatif, jenis informan/responden ada dua yaitu informan kunci (*key informan*) dan informan sekunder (*secondary informan*). Informan kunci yaitu mereka yang dianggap menguasai objek penelitian. Sedangkan pada informan sekunder untuk melengkapi informasi data-

data tentang objek penelitian untuk membanyak analisis, tetapi tidak harus ada.

Adapun informan dalam penelitian ini ialah :

NO.	Unsur Informan
1.	Sekertaris Daerah Luwu Utara
2.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Luwu Utara
3.	Camat Kecamatan Bone-Bone dan Camat Kecamatan Sukamaju
4.	Kepala Desa Sukaraya dan Kepala Desa Wonokerto
5.	Masyarakat

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai, yakni berikut :

##### 1. Wawancara (Interview)

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang objek yang akan menjadi bahan penelitian dengan cara tanya jawab secara lebih rinci dan terbuka dengan secara langsung pada informan/responden. Wawancara ialah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang akan mengajukan pertanyaan dan yang akan diwawancarai (*interviewee*) kemudian memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan itu.

## 2. Observasi Langsung

Teknik ini merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang akan diteliti guna mendapatkan keterangan yang berupa informasi, data serta fakta akurat yang berkaitan dengan objek penelitian. Pada teknik ini juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keseimbangan antara keterangan informan atau responden dan data pada kenyataan yang ada dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek dan tetap mengawasi keabsahannya. Observasi didefinisikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis pada gejala atau masalah yang nampak di objek penelitian.

## 3. Studi kepustakaan

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data-data pendukung (data sekunder) dari berbagai literatur baik berupa buku, makalah, majalah, hasil penelitian yang relevan, koran dan dokumen-dokumen tertulis lain sebagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan atas penjelasan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012: 92-99), yaitu:

### 1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data adalah tindakan memilih dan memilah data-data yang sesuai dengan obyek penelitian melalui perangkuman, memilih data-data pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola serta membuang hal-hal yang dianggap tidak perlu.

### 2. Penyajian Data (*display data*)

Data yang dikumpulkan oleh penulis akan disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan menjelaskan hubungan masing-masing kategori dan melampirkan dalam sebuah bagan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing and verification*)

Kesimpulan yang ditemukan masih bersifat sementara sampai ditemukannya data dan bukti yang lebih valid untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

### **G. Keabsahan Data**

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Sugiyono (2012), membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang sudah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti melakukan perbandingan antara hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan lagi antara hasil wawancara dengan dokumentasi yang ada..

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan data dari sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang didapatkan dari wawancara, kemudian melakukan pengecekan dengan observasi dan dokumen. Jika tiga teknik ini mendapatkan hasil data yang berbeda, maka peneliti harus mendapatkan data yang valid dengan cara melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber daya untuk mengetahui data

mana yang benar atau mungkin semuanya benar karena pendapat mereka berbeda-beda.

### 3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dengan narasumber, teknik wawancara ini dilakukan pada pagi hari pada saat narasumber masih segar bugar dan belum ada masalah sehingga akan memberikan data yang valid. Untuk itu pengujian kredibilitas ini dilakukan dengan mengecek wawancara, observasi dan teknik lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Letak Geografis dan Kondisi Wilayah Kabupaten Luwu Utara**

Kabupaten Luwu Utara adalah merupakan salah satu Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak kurang lebih 420 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan terletak diantara  $01^{\circ} 53' 019''$  -  $02^{\circ} 55' 36''$  Lintang Selatan (LS) dan  $119^{\circ} 47' 46''$  -  $120^{\circ} 37' 44''$  Bujur Timur (BT) dengan batas-batas administrasi: – Sebelah Utara : berbatasan dengan Sulawesi Tengah – Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Luwu & Teluk Bone – Sebelah Barat : berbatasan dengan Prov. Sulawesi Barat – Sebelah Timur : berbatasan dengan Luwu Timur Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara sekitar 7.843,57 Km<sup>2</sup> terbagi dalam 12 kecamatan yang meliputi 173 desa/kelurahan yang terdiri dari 4 kelurahan dan 169 desa. Dan terdapat 8 sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Dan sungai terpanjang adalah Sungai Rongkong dengan panjang 108 Km. Serta curah hujan beragam rata-rata selama tahun 2010 Diantara 12 Kecamatan, Kecamatan seko merupakan Kecamatan yang terluas dengan luas 2.109,19 Km<sup>2</sup> atau 28,11 % dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus merupakan kecamatan yang terletak paling jauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara , yakni berjarak 198 Km. Urutan kedua adalah Kecamatan Rampi dengan luas 1.565,65 Km<sup>2</sup> atau 20,87 % dan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat dengan luas wilayah 93,75Km<sup>2</sup> atau 1,25 % dan pada

tahun 2012 di bentuk satu kecamatan baru yang pemekarannya dari kecamatan Bone-Bone berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Utara Nomor : 01 tahun 2012 tanggal 05 April 2012 dan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor : 19 Tahun 2012 Tanggal 04 Juni 2012 tentang pembentukan Kecamatan Tana Lili dengan jumlah 10 Desa.

### **1. Gambaran Umum Desa Wonokerjo**

#### **a. Monografi**

Desa Wonokerto memiliki luas wilayah 480 Hektar dengan jumlah dusun sebanyak 3 ( tiga ) dusun. Selain itu Desa wonokerto terletak pada ketinggian 4 meter dari permukaan air laut adapun batas-batas dari Wonokerto adalah sebagai berikut:

- Seblah Utara berbatasan dengan : Desa Rawamangun.
- Seblah Timur berbatasan dengan : Desa Lino
- Seblah Selatan berbatasan dengan : Desa Subur
- Seblah Barat berbatasan dengan : Desa Sumber Baru

#### **b. Kondisi Sosial Ekonomi**

Berdasarkan kondisi geografisnya letak desa wonokerto yang merupakan dataran rendah dimana 95% sumber penghasilan masyarakat adalah tergantung dari hasil pertanian tanaman pangan, dan perkebunan.

Sebagian masyarakat desa wonokerto menjadi pekerja bangunan, peternak sapi, peternak kambing, ternak ayam, serta pekerjaan lainnya.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena hasil pertanian sering mengalami kegagalan karena jaringan irigasi dan teknis belum memadai sehingga kebutuhan air petani belum tercukupi serta harga hasil pertanian sifatnya masih didominasi oleh tengkulak. Sementara pekerja buruh bangunan masih banyak yang berharap dari pekerjaan di daerah lain. Namun di sisi lain kondisi ekonomi di desa wonokerto dapat berjalan dengan baik dikarenakan desa wonokerto memiliki potensi pasar desa sehingga sebagian besar hasil bumi masyarakat desa dapat dijual langsung di pasar desa.

c. Visi Misi

- VISI :

TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG MAJU, MANDIRI,  
SEJAHTERA, ADIL, DAN MAKMUR

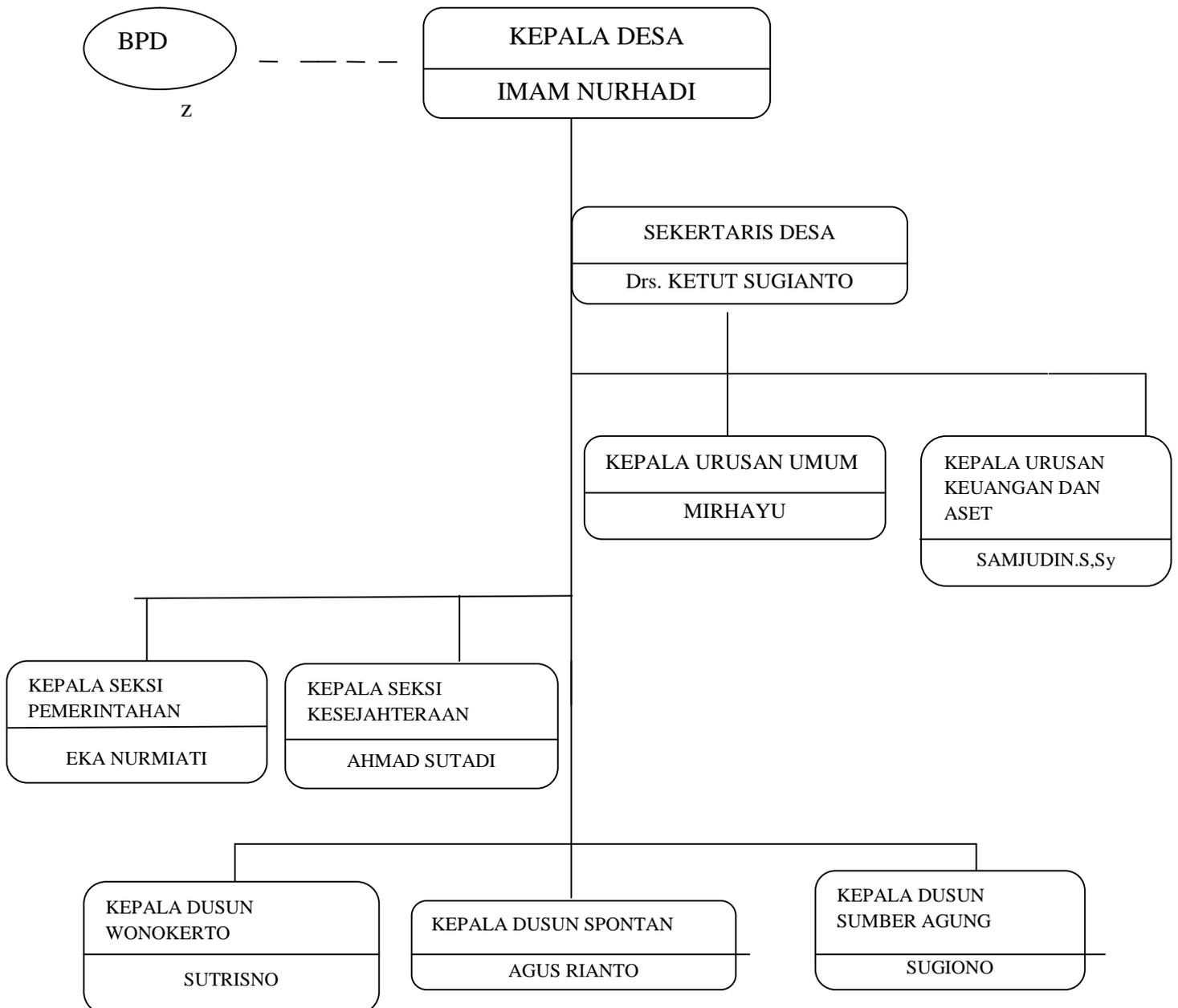
- MISI:

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat lewat pengoptimalan perangkat desa yang efektif.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa.
- 3) Meningkatkan kualitas apratur desa.

## d. Struktur Organisasi

Gambar 1.3  
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonokerto

Kecamatan. Sukamaju



## **2. Gambaran Umum Desa Sukaraya.**

### **a. Monografi**

Desa Sukaraya merupakan salah satu Desa yang sebagian besar penduduknya mengelola lahan pertanian dan perkebunan . Desa sukaraya secara administrasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Sukaraya memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Seblah Selatan : Desa Sadar
- 2) Seblah Utara : Desa Banyuurip
- 3) Seblah Timur : Desa Tamuku
- 4) Seblah Barat : Desa Rawamangun

Secara geografis Desa sukaraya memiliki data orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) adalah sebagai berikut:

- Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 5 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan kota : 35 Km
- Jarak dari pusat pemerintahan provinsi : 487 Km

Berdasarkan data monografi Desa Sukaraya, luas Desa Sukaraya adalah 495,00 ha/m<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 3 Dusun meliputi : Dusun Sidodadi,Dusun Sumberjaya dan Dusun Cinta Mulya yang terdiri dari 11 Rt.

Luas tanah tersebut digunakan untuk berbagai keperluan baik Lahan sawah 190 ha, lahan perkebunan 199 dan Lahan lainnya 106 ha. Desa Sukaraya mempunyai

keadaan tanah yang tergolong dalam dataran rendah diatas permukaan laut 2.5 km.

b. Kondisi Ekonomi

Jumlah total Penduduk Desa Sukaraya laki-laki dan perempuan sekitar 1.040 jiwa Penduduk Desa Sukaraya sebagian besar bekerja sebagai petani dan pekebun dan sebagian sebagai buruh tani, buruh kebun, tukang batu/kayu, buruh bangunan, usaha kios/warung (penjual Keliling), kerajinan, pabrik pengilingan padi dan usaha ternak. Sedangkan potensi desa yang paling menonjol adalah potensi persawahan (petani padi) dan perkebunan (kelapa sawit) .

Selain itu tanaman keras yang melalui proses adaptasi sebagian dapat berproduksi dengan baik pada tempat yang tergolong rendah dengan keadaan tanah kering di beberapa wilayah dusun yang ada di Desa Sukaraya. Sedangkan tanaman perkebunan yang menjadi andalan penduduk setempat adalah Kelapa Sawit dan Untuk areal tanaman pertanian yaitu padi.

Dengan melihat gambaran potensi yang ada di Desa Sukaraya terutama sumber daya alamnya dan didukung sarana jalan dan jembatan penghubung antar desa ,maka pemerintah desa melalui usulan ke pemerintah kabupaten dan provinsi berusaha dan mencoba secara bertahap meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang ada maupun jalan terutama yang mengalami kerusakan sehingga mampu memperlancar aktivitas warga maupun perekonomian Desa Sukaraya yang mayoritas masyarakatnya adalah petani dan Pekebun.

c. Visi Misi

- Visi

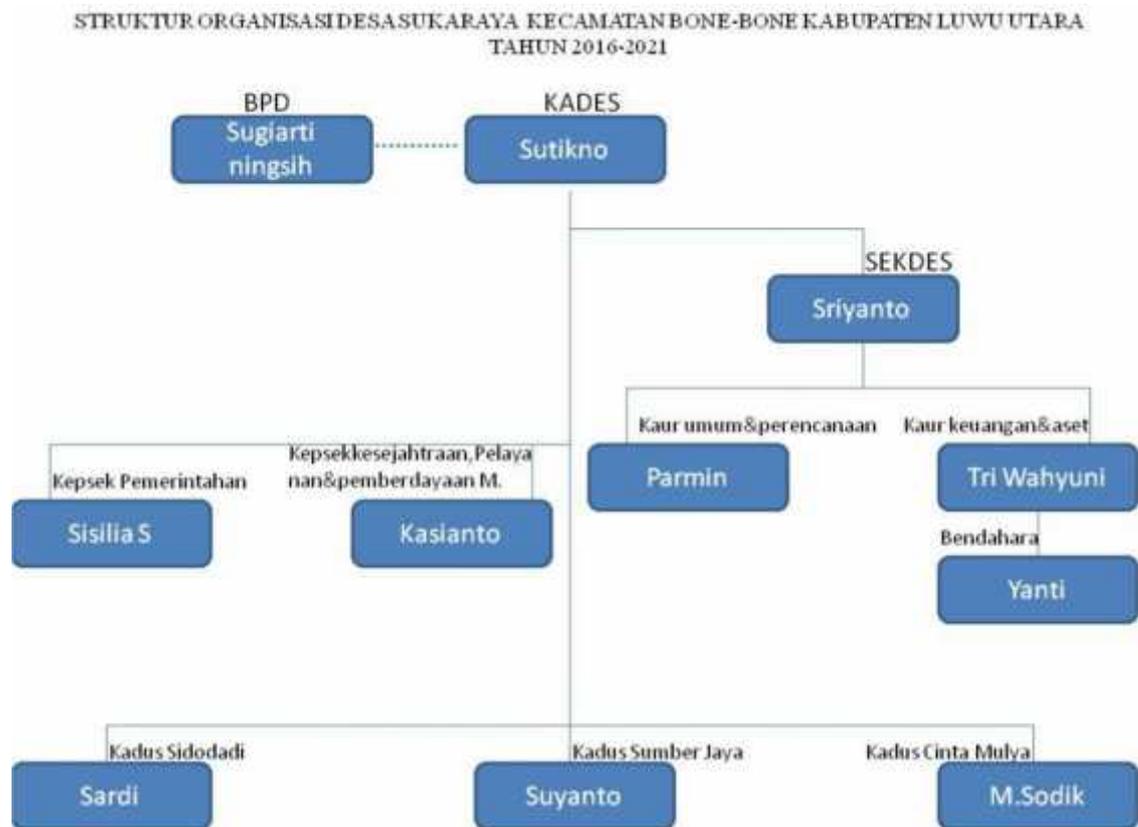
“MEWUJUDKAN DESA SUKARAYA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA, YANG BERTUMPU PADA SEKTOR PERTANIAN, PEKEBUNAN DAN PETERNAKAN”

- Misi

1. Memberikan pelayanan yang baik dan mudah kepada masyarakat kapanpun dan dimanapun tanpa didasari perbedaan suku, agama ataupun golongan serta tidak memposisikan Pemerintah Desa sebagai penguasa akan tetapi merupakan pelayan bagi semua masyarakat.
2. Meningkatkan kapasitas, Citra, Harkat dan Martabat Pemerintah Desa serta menjaga dan meningkatkan toleransi antar umat beragama.
3. Mengupayakan terwujudnya Sarana dan Prasarana untuk kegiatan generasi muda dalam menyalurkan bakat olah raga.
4. Melanjutkan beberapa Program yang belum terealisasi yang termuat dalam RPJMDes 2013-2019.
5. Menciptakan Pemerintah yang transparan Jujur dan Adil.

## d. Struktur Organisasi

Gambar 1.4



## 2. Difusi Inovasi Desa Mandiri Terpadu ( Studi Kasus : Desa Mandiri Terpadu di Kabupaten Luwu Utara.

Difusi merupakan bagian dari sebuah inovasi kebijakan yakni merupakan sebuah proses inovasi yang di komunikasikan melalui saluran dari waktu ke waktu oleh anggota sistem sosial. Ini merupakan tipe khusus dalam komunikasi, dalam hal ini gagasan baru. Komunikasi adalah sebuah proses membuat peserta dan membagi informasi yang satu dengan yang lain. Untuk mencapai kerjasama. Defenisi ini menyiratkan bahwa komunikasi adalah proses konvergensi ( atau perbedaan) sebagai dua atau lebih individu bertukar

informasi untuk bergerak ke arah yang lain ( atau terpisah) dalam artian mereka memberikan kepada peristiwa tertentu. Kita berpikr komunikasi sebagai proses dua arah dalam konvergensi.

Jadi difusi adalah tipe khusus dalam komunikasi melalui saluran tentang gagasan baru. Hal ini adalah gagasan dalam konten saluran memberikan difusi khususnya karakter. Difusi adalah semacam perubahan sosial, di definisikan sebagai proses yang mana dari alternatif terjadi dalam struktur dan fungsi dari sistem sosial. Seperti hal yang di kemukakan oleh Everret M. Roger dalam bukunya *Diffusion of inovation* yang menjelaskan ada 4 indikator dalam mengukur sebuah kebijakan inovasi yakni sebagai berikut : inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial. Hal ini akan menjadi tolak ukur dalam milhat seberapa besar tingkat keberhasilan sebuah inovasi, Sehingga penulis berfokus pada Difusi Inovasi Desa Terpadu Mandiri (Studi Kasus : Desa Terpadu Mandiri di Kabupaten Luwu Utara) dengan menggunakan teori dari Everret M. Roger.

## **1. Inovasi**

Yang di maksud inovasi yakni adalah sebuah gagasan, praktik, atau objek yang di anggap baru oleh individu, atau unit adopsi yang lain. Itu sedikit penting, sejauh mana keprihatinan tingkah laku manusia. Ada atau tidak gagasan yang baru objektif seperti yang di ukur dari selang waktu sejak pengguna pertama atau pemulihan. Pembaharuan dalam sebuah inovasi tidak hanya membutuhkan keterlibatan pengetahuan yang baru. Seorang

mungkin tahu tentang inovasi dalam suatu waktu tidak berkembang jauh atau tindakan yang tidak dapat tertatasi, maupun hanya adopsi atau mengabaikan pembaharuan dalam inovasi mungkin di katakan dalam istilah pengetahuan, rujukan atau adopsi pengambilan keputusan.

**Tabel 2.2**

**Difusi Inovasi Desa Mandiri Terpadu**

No	Informan	Indikator Inovasi
1	Sekertaris Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Program berdasarkan anggaran yang ada</li> <li>b. Masyarakat di harapkan mandiri dan berjiwa enterpreneur.</li> <li>c. Program masih dalam tahap pembinaan.</li> <li>d. Diadakan monitoring dan evaluasi</li> </ul>
2	Kepala Dinas PMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sudah diterapkan Germas hidup sehat yang belum diterapkan di desa lainnya.</li> <li>b. Keunggulannya yakni semua SKPD terlibat sebelumnya hanya beberapa SKPD.</li> <li>c. Ada tiga ciri khas dari program desa terpadu mandiri, pertama semua SKPD terlibat, kedua pengeluaran peraturan dari bupati, tiga kemungkinan penerapan program pada daerah tersebut.</li> <li>d. Kerumitan yakni diperlukan komitmen yang kuat, dan faktor penghambat yang ada yakni sistem penganggaran serta masyarakat yang masih kurang paham.</li> </ul>
3	Camat Bone-Bone	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sering di adakan monitoring dan evaluasi lapangan.</li> </ul>

4	Camat Sukamaju	<p>b. Tergantung dari anggaran yang tersedia pada SKPD.</p> <p>c. Masyarakat lebih aktif di bandingkan sebelumnya.</p> <p>d. Sering diadakan pembinaan pada tingkat kecamatan dan desa.</p> <p>a. Kerumitannya masyarakat dan pemerintah desa yang sering di kunjungi dan faktor penghambat belum paham tentang desa terpadu mandiri.</p> <p>b. Perubahan pada perilaku masyarakat terkait desa mandiri terpadu.</p> <p>c. Program tidak signifikan, sama saja dengan program sebelumnya</p>
5	Kepala desa Sukaraya	<p>d. Saat ini dominan penyelenggaraan dilakukan pada tingkatan umur yang lebih muda.</p> <p>a. Penghambat schedule yang bersamaan dengan kegiatan lain.</p> <p>b. Hasil belum nampak.</p> <p>c. Tidak ada inovasi yang diganti hanya saja pengembangan dari inovasi sebelumnya.</p>
6	Kepala Desa Wonokerjo	<p>d. Faktor pengetahuan dan SDM aparat desa yang rendah.</p> <p>a. Keberhasilan masih belum sesuai yang diharapkan.</p> <p>b. Inovasi saat ini masih sama dengan sebelumnya hanya saja lebih ditekankan pada ekonomi mandiri.</p> <p>c. Faktor penghambat dan kerumitan hanya saja pemahaman masyarakat yang masih kurang.</p> <p>d. Hasil penerapan masih kurang nampak</p>

7	Rahmat Junaidi (masyarakat)	Tidak paham desa terpadu mandiri
8	Sudirman (masyarakat)	
9	Hasan (Masyarakat)	Tidak mengerti desa terpadu mandiri
10	Agus surahman (masyarakat)	tidak paham
11		tidak tau
12	Edi Sunandar ( masyarakat)	tidak tau
	Hartono (masyarakat)	tidak tau

(Sumber: Hasil reduksi data 2018)

Pada tabel diatas merujuk kepada inovasi, yakni sebuah hal baru atau gagasan baru yang digunakan oleh pemerintah Luwu Utara dalam membangun daerahnya khususnya pada program desa terpadu mandiri di desa sukaraya dan di desa wonokerto.

- a. Dari tabel diatas menunjukkan bahwasannya keunggulan dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah luwu utara hal ini ditunjukkan dengan wawancara yang dilakukan, pada hal ini berdasarkan pernyataan dari informan yang berinisial AM (SEKDA Luwu Utara) yang mengatakan :

“....saya kira begini kalau sudah inovasi mungkin ya kalau kita bicara inovasi berarti inovasi harus integreated terpadu tentu desa itu tidak hanya dari desa saja, jadi kalau dulu berangkali hanya program-program yang di ini sama desa sendiri kemudian setelah itu programnya sekarang terpadu berarti disitu ada Kbnya juga kampung K, puskesmasnya ada, dokter-dokternya ada jdi beberapa SKPD sudah turun tangan kesitu itu yang membedakan dengan program sebelumnya...” (hasil wawancara 26 Oktober 2018)

Selanjutnya yang dikatakan oleh AM (SEKDA) hampir senada dengan yang dikatakan oleh MS (Kepala dinas PMD) yakni mengatakan :

“...keunggulan yang pertama SKPD itu mengalokasikan program di desa terpadu mandiri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya kalau sebelumnya, itu SKPD belum mengalokasikan anggaran maupun kegiatan di desa terpadu...” (hasil wawancara 29 Oktober)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa keunggulan dalam inovasi terpadu mandiri yakni bergeraknya semua SKPD yang ada di Kabupaten Luwu utara ke dalam desa yang ditunjuk sebagai *pilot project* dan kemudian memberikan seluruh pelayanan ataupun menggerakkan kegiatan-kegiatan desa. Namun berbeda dengan yang dikatakan oleh SRN (Camat Bone-Bone) bahwasannya keunggulan dari desa terpadu tersebut yakni :

“...masyarakat lebih aktif di bandingkan ee program sebelumnya.” (wawancara 15 oktober 2018)

Kemudian berbeda lagi dengan yang dikatakan oleh MP ( camat Sukamaju) yakni sebagai berikut :

“...tidak ada yang signifikan karena itu juga yang dilakukan yang untuk sebelum mandiri itu juga yang dilakukan dengan sekarang, ee inovasi yang baru itu yang dilakukan sekarang itu ee, itu gerakan membangun desa. yaa gerakan membangun desa ada kelompok itu di canangkan juga di desa wonokerto, dan itu sudah terlaksana.” ( wawancara 18 Oktober 2018)

Dari kedua hasil wawancara oleh SRN dan MP memiliki pendapat yang cukup berbeda yang mana menurut SRN keunggulan dari adanya inovasi desa terpadu mandiri ini adalah masyarakat bekerja lebih dan cukup aktif, berbeda

dengan yang dikatakan oleh MP bahwasannya tidak ada keunggulan signifikan dari inovasi sebelumnya pada gerakan membangun desa.

Kemudian yang dikatakan MP (camat Sukamaju) senada dengan yang dikatakan oleh STO (kepala desa sukaraya) yakni :

“...jadi sehubungan dengan inovasi yang terkait dengan desa mandiri terpadu, sebenarnya tidak ada yang diganti. Cuma saja inovasi-inovasi itu justru lebih dikembangkan, jadi dalam hal ini kesesuaian inovasi diganti atau program terdahulu itu menyambung atau sesuai hanya saja setelah desa ditetapkan menjadi desa mandiri terpadu, pelaksanaan inovasi tersebut di desa sangat ditekankan.” (wawancara 17 oktober 2018)

Serta senada dengan yang dikatakan oleh IH (kepala desa Wonokerjo yang mengatakan sebagai berikut :

“...kalau persoalan kesesuaian inovasi mungkin tidak terlalu beda jauh dengan inovasi-inovasi yang kemarin, mungkin sekarang lebih ditekankan kepada ekonomi mandiri masyarakat” (wawancara 16 Oktober 2018)

Berdasarkan hasil wawancara oleh STO (kepala desa sukaraya) dan IH (kepala desa wonokerjo) dapat disimpulkan bahwasannya sebenarnya inovasi terpadu mandiri di lapangan tidak ada perubahan yang signifikan inovasi yang digunakan masih sama halnya dengan inovasi-inovasi sebelumnya hanya saja kemudian lebih ditekankan untuk di kembangkan kegiatan-kegiatan dalam membangun desa tersebut.

Jadi dari hasil wawancara yang dilakukan dapat di simpulkan bahwasannya keunggulan dari desa terpadu mandiri sebenarnya yakni bergerakanya semua

SKPD ke desa dalam membantu semua pembangunan, namun pemerintah desa belum mampu menjalankan inovasi tersebut sehingga masih belum ada perubahan yang signifikan pada desa yang dijadikan sebagai *pilot project* desa mandiri terpadu.

b. Dari tabel 1 diatas menunjukkan ciri khas dari inovasi terpadu mandiri yang dilakukan pemerintah kabupaten luwu utara. Hal ini di tunjukkan dengan wawancara yang dilakukan pada informan AM (SEKDA) yang mengatakan:

“...masyarakat itu diharapkan untuk punya jiwa enterpreneur berusaha sehingga muncullah bebrapa UMKM ya itu yang membedakan ciri khasnya inovasi desa terpadu, kemudian masyarakat di sana diajak untuk bagaimana berusaha karena di sana itu rata-rata masyarakatnya usaha menanam budidaya di harapkan dia selain disitu dia juga berusaha UMKM.” (wawancara 26 Oktober)

Selanjutnya yang dikatakan AM (SEKDA) berbeda dengan yang di katakan oleh MB (Kadis PMD) yang menyatakan :

“...ciri khas dari inovasi desa yang pertama semua SKPD itu diwajibkan untuk meassignment desa tersebut itu yang pertama, kemudian yang kedua untuk memperkuat itu pemerintah dalam hal ini bupati mengeluarkan peraturan bupati tentang desa terpadu mandiri, yang ketiga adanya ke aneka ragam suku dan kondisi daerah disana yang memungkinkan untuk penerapan seluruh program ideal untuk sebuah desa yang mandiri...” (wawancara 29 oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas dengan informan AM dan MB bahwasannya ciri khas dari desa terpadu mandiri ini yakni untuk memandirikan masyarakat memberikan jiwa enterpreneur, akan tetapi berbeda dengan MB yang lebih bersifat teknis yakni semua SKPD yang terjun langsung masuk ke desa yang terpilih sebagai *pilot project*. Hal ini berbeda lagi dengan yang dikatakan oleh SRN (Camat bone-bone) yang mengatakan :

“...pemerintah sering mengadakan pembinaan baik dari tingkat kecamatan dan maupun ee dari tingkat kabupaten..” (wawancara 15 Oktober 2018)

Kemudian yang dikatakan MP tidak senada dengan yang dikatakan oleh semuanya yakni sebagai berikut:

“...programkan pada umumnya ee masyarakat yang melakukan, sebelumnya itu jugakan masyarakat yang melakukan dan sekarang ini kan masyarakat, hanya ya mungkin hanya bergeser dari umur kalau yang sekarang ini dominan yang muda-muda, karena yang namanya pemuda kelompok membangun desa, kemudian dulu itu itu agak-agak umurnya agak-agak lanjut, yang terlibat langsung. (wawancara 18 oktober 2018)

Dari hasil wawancara SRN dan MP tidak senada dengan apa yang dikatakan yang mana ciri khas dari inovasi ini adalah hanya sering diadakan pertemuan rutin sedangkan menurut MP hanya pergeseran orang dalam melakukan kegiatan dari umur yang sudah lanjut kemudian memperdayakan masyarakat yang lebih produktif.

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya tidak adanya kordinasi dari pemerintah daerah ke pemerintah kecamatan bahkan ke pemerintah desa, kurangnya pemahaman yang diberikan pemerintah daerah kepada aparat-aparat yang akan bertugas.

c. Dari tabel 1 di atas menunjukkan kerumitan dan faktor penghambat yang ada pada desa terpadu mandiri di kabupaten luwu utara, berdasarkan informan AM (Sekda) mengatakan bahwa kerumitan dan faktor penghambatnya yakni :

“...saya kira ini dalam tahap pembinaan, dilakukan pembinaan pembinaan setiap kegiatan pemerintah khususnya pada setiap kbid...” (Wawancara 26 oktober)

Kemudian dari hampir senada dengan yang dikatakan oleh AM namun lebih melengkapi informan MB mengatakan bahwa tingkat kerumitan dan faktor penghambat yakni adalah :

“...ya tingkat kerumitannya pertama, untuk mengsinergikan program di seluruh SKPD itu membutuhkan komitmen yang kuat dari BAPPEDA selaku perencana dan komitmen yang kuat dari PMD selaku teknis dan komitmen juga yang sama kuat dari seluruh SKPD untuk mengalokasikan program, kemudian terkait faktor penghambatnya saya kira adanya sistem penganggaran yang mungkin menurut kita masih sudah tinggi tapi kebutuhan di lapangan belum cukup yang kedua masyarakat sendiri untuk di sadarkan tidak semudah yang kita bayangkan. Bahwa walaupun kita berikan sosialisasi terpadu mandiri membuat desa mu desa yang layak di kunjungi seluruh desa karena desa terpadu mandiri itu sebuah desa yang seluruh lembaga, seluruh syarat untuk menjadikan dia menjadi sebuah desa yang maju itu harus ada, sehingga kesadaran masyarakatnya menjadi salah satu yang mendukung.” (wawancara 29 oktober)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh AM dan MB faktor penghambat dari inovasi tersebut melainkan pembinaan dan komitmen yang kuat dalam menjalankan desa terpadu mandiri ini.

Senada dengan yang dikatakan oleh SRN (camat bone-bone) bahwasannya kerumitan dan faktor penghambat desa terpadu mandiri ini yakni :

“...kerumitannya, tentu masyarakat ya termasuk aparat desa pasti ee seringlah dikunjungi ee atau di bina dalam proses program terkait dengan desa terpadu. yaa faktor-faktor penghambat, yaa yang pertama yaitu aparat desa yang belum mengerti tentang desa mandiri itu sendiri, yang kedua masyarakat belum paham tentang apa itu desa mandiri...” (wawancara 15 oktober 2018)

Namun berbeda dengan yang dikatakan oleh informan MP yang mengatakan :

“...penghambatnya sekarang saya kira tidak ada, hanya masalah kalau persis bertepatan dengan kegiatan-kegiatan ee sosial ee kemasyarakatan, kemasyarakatan dan sosial kan biasa ada keramaian yang anunya desa atau

bertepatan dengan ee mayoritas disinikan petani yang turun sawah dengan yang bekerja di petani dan pekebun...” (wawancara 18 oktober 2018)

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa kurangnya perhatian atasan kepada bawahan seperti aparat desa sehingga, atasan tidak tahu tentang apa saja kesulitan yang terjadi pada desanya. Informan STO (kadesa sukaraya) senada dengan tiga informan diatas yakni mengatakan bahwa :

“...untuk pelaksanaannya tersebut, dek yaa cukup rumit. Karena faktor pengetahuan dan SDM pemerintah desa, ataupun masyarakat di desa pada umumnya masih rendah” (wawancara 17 oktober 2018)

Kemudian hal ini juga senada dengan yang di katakan oleh informan IH yakni kerumitan dan faktor penghambat desa terpadu mandiri yakni :

“...Kalau soal faktor kerumitan dengan faktor penghambat mungkin tinggal pemhaman masyarakat tentang program ini karena hanya sebagian dari masyarakat yang mengerti dan paham tentang program desa mandiri ini.”(wawancara 16 oktober 2018)

Jadi faktor penghambat yang ada pada desa terpadu mandiri adalah kurangnya pemahaman akan apa desa terpadu mandiri itu kurangnya alokasi dana pada program-program di desa terpadu mandiri, dan kurangnya perhatian atasan terhadap perkembangan program desa terpadu mandiri.

- d. Pada tabel 1 menunjukkan seberapa besar program desa terpadu mandiri layak digunakan dan dilanjutkan dengan adanya uji kualitas publik, berdasarkan informan AM (sekda) yakni :

“...sering-sering diadakan monitoring, evaluasi-evaluasi untuk melihat seberapa layak ini program di jalankan” (wawancara 26 oktober 2018)

Kemudian senada dengan yang dikatakan oleh MB (Kadis PMD) yakni sebagai berikut:

“...jadi ini kita sering laksanakan yang namanya monitoring jadi monitoringnya kelengkapan kemudian evaluasinya dilaksanakan di aula kantor Bappeda maupun di sini. Kita memonitor, mengevaluasi sejauh mana pekerjaan tersebut dilakukan untuk dilaksanakan di desa itu” (wawancara 29 oktober 2018)

Jadi terkait dengan uji kualitas publik pemerintah selalu melakukan monitoring dan pertemuan-pertemuan untuk mengevaluasi seperti apa kinerja aparat desa terkait program desa terpadu mandiri untuk melihat seberapa besar.

- e. Berdasarkan tabel 1 menunjukkan seberapa besar penerapan program desa terpadu mandiri yang ada di kabupaten luwu utara, dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan AM (Sekda) yang mengatakan bahwa :

“...penerapannya itu jadi masyarakat di ajak agar supaya betul-betul bisa berusaha dan punya jiwa enterpreneur yang dan bisa melaksanakan Germas hidup sehat, yakni sudah diterapkan disana itu Germas hidup sehat berdasarkan lingkungan dan makanan masyarakat itu yang membedakan dengan masyarakat lain”(wawancara 26 oktober)

Namun berdasarkan informan MB (kadis Pmd) bahwasannya penerapan desa terpadu mandiri di kabupaten luwu utara berdasarkan :

“...ya kita mengacu ke sistem penganggaran ada yang tahunan jadi setiap tahun itu di alokasikan anggaran oleh masing-masing SKPD kemudian PMD selaku pembina itu mengalokasikan anggaran pembina khusus untuk desa terpadu mandiri.” (wawancara 29 oktober 2018)

Berdasarkan kedua informan diatas penerapan desa terpadu mandiri sudah dapat dilihat adapun beberapa program sudah dijalankan, namun sebenarnya

penerapan program desa terpadu mandiri ini berdasarkan anggaran tahunan yang dimiliki oleh masing-masing SKPD. Senada dengan yang dengan AM (sekda) SRN (camat bone-bone) mengatakan :

“...alhamdulillah sudah cukup banyak perubahan baik dari sikap, perilaku masyarakat dan aparat desa itu sendiri. (wawancara 15 oktober 2018)

Namun berbeda dengan informan MP yang mengatani :

“...kalau saya belum terlalu diliat sekarang, ya nanti- nanti di e di tahun 2019 karena ee kelompok membangun desa ini boleh dikatakan baru tahun ini, nanti diliat dampaknya itu pada tahun berikutnya”

Berdasarkan informan MP program desa mandiri terpadu masih belum nampak dikarenakan masih sangat baru diterapkan, senada dengan yang dikatakan oleh informan STO (kades sukaraya yakni:

“...penerapannya inovasi disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di desa, serta kebutuhan masyarakat, ee sampe hari ini keberhasilan dari inovasi itu masih belum sesuai seperti yang diharapkan. jadi masih sementara berjalan yang jelasnya sampai hari ini untuk tingkat keberhasilannya ya mohon maaf ini, jujur saja belum sesuai seperti apa yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten maupun masyarakat.”

Kemudian juga pernyataan dari STO (kades sukaraya) senada dengan IH (kades wonokerjo) yakni :

“...penerapan inovasi ini mungkin kita bekerja sama dengan beberapa masyarakat dan juga kita dibantu oleh pemerintah luwu utara kalau persoalan penerapannya hasil penerapannya mungkin untuk sementara hasil penerapannya yaahh itu itu saja karena ini program masih dibilang program baru.”

Jadi penerapan desa terpadu mandiri ini masih sangat baru sehingga belum adanya penerapan yang signifikan yang didapatkan oleh pemerintah, namun beberapa atas mengatakan sudah adanya perubahan yang menjadikan hal ini tidak adanya kordinasi antara bawahan dan atasan dengan baik.

Berdasarkan informan beberapa masyarakat telah diwawancarai mengenai inovasi desa terpadu mandiri, salah satunya adalah informan ES (masyarakat) yang mengatakan :

“...saya kurang tau kalau urusan program desa apa saja karena sudah diatur dan di urus semua mi toh sama aparat desa.” (wawancara 28 oktober 2018)

Jadi berdasarkan keseluruhan wawancara yang telah di paparkan pada indikator inovasi dalam program desa terpadu mandiri, masih sangat kurang, khususnya dalam kordinasi antar sesama pemerintah terkait, baik itu antara pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa sebagai motor penggerak dari program desa terpadu mandiri, kemudian terkait dengan hambatan yang di alami oleh pemerintah yakni masih kurangnya sumberdaya manusia dan pengetahuan serta keterampilan aparat desa dalam mengolah program desa terpadu, dan juga masih kurangnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada aparat desa. sehingga penerapan dari desa terpadu mandiri menjadi kurang dan bahkan tidak berjalan dikarenakan kurangnya kordinasi antara pemerintah terkait.

## 2. Saluran Komunikasi

Difusi adalah tipe tertentu komunikasi dalam isi pesan dengan gagasan baru. Esensi dari proses difusi adalah pertukaran informasi. Melalui komunikasi satu arah dengan gagasan baru untuk beberapa orang. Pada bentuk paling mendasar melibatkan proses, 1) sebuah inovasi 2) sebuah individu atau unit lain dari adopsi yang memiliki pengetahuan inovasi atau pengalaman menggunakannya 3) individu yang lain yang tidak memiliki pengalaman dengan hal tersebut, dan 4) koneksi saluran komunikasi dua unit. Saluran komunikasi yang berarti mendapatkan pesan dari satu individu untuk yang lain. Sifat informasi- pertukaran hubungan antara sepasang individu menentukan kondisi sumber yang akan atau tidak akan mengirimkan inovasi untuk pengirim, dan akibat dari pengirim.

**Tabel 2.3**  
**Difusi inovasi Desa Mandiri Terpadu**

<b>NO</b>	<b>Informan</b>	<b>Indikator Saluran Komunikasi</b>
1.	Sekretaris Daerah	a. Tidak ada masalah pada komunikasi b. SKPD terkait sudah bergerak
2.	Kepala Dinas PMD	a. Komunikasi inovasi terkait dibidang IT b. Kordinasi dan laporan rutin terkait program
3.	Camat Bone-Bone	a. Penyampaian informasi di tempat umum dan tempat ibadah. b. Tidak ada
4.	Camat Sukamaju	a. Penyampaian informasi ditempat formal dan umum dan tempat ibadah b. Berdasarkan permusyawaratan bersama masyarakat.
5.	Kepala Desa sukaraya	a. Penyampaian informasi di tempat umum dan

6.	Kepala Desa Wonokerto	tempat ibadah b.Saling memberikan informasi satu sama lain a. Penyampaian informasi oleh pemerintah desa langsung melalui sosialisasi
7.	Rahmat Junaidi (masyarakat)	b. Kurangnya lembaga organisasi di desa. Tidak ada informasi
8.	Sudirman (masyarakat)	Tidak ada informasi
9.	Hasan (Masyarakat)	Tidak ada informasi
10	Agus Surahman	Tidak ada informasi
11.	Edi Sunandar (masyarakat)	Tidak ada informasi
12	Hartono Budiman (masyarakat)	Tidak ada informasi

(Sumber: Hasil Reduksi data 2018)

- a. Pada tabel diatas diatas merujuk kepada indikator saluran komunikasi khususnya dalam terwujudnya tujuan inovasi dalam komunikasi yang dilakukan, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama informan AM (sekda) mengatakan :

“...komunikasi saya kira ini bisa juga berpotensi untuk Smartcity dan smartvirit itu tidak ada masalah disana, komunikasi antar desa kemudian komunikasi melalui IT juga ada”

Kemudian pernyataan dari AM juga senada dengan yang dikatakan oleh MB bahwa :

“...salah satu yang kita peran dari Kominfo, Dinas komunikasi informatika itu desa wonokerto dan desa dan desa mario sebagai desa terpadu mandiri itu kita

sudah buat semua website, jadi komunikasi inovasinya. Kemudian yang kedua untuk mendukung program itu juga kita perkuat di profil desa online”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh AM dan MB komunikasi yang digunakan dalam mewujudkan inovasi tersebut yakni komunikasi digital yang mendukung program desa terpadu mandiri untuk lebih mudah dalam berkomunikasi secara bebas dan luas.

- b. Pada tabel diatas menunjukkan seperti apa hasil pertukaran informasi antara pemerintah dengan instansi/opd terkait, berdasarkan hasil wawancara bersama AM (sekda) yang mengatakan:

“itu tadi sudah terpadu beberapa SKPD kita sudah kesana misalnya BPP ada disana untuk pola pekarangan.”

Selanjutnya pernyataan AM senada dengan yang dikatakan oleh MB (kadis PMD) yang mengatakan:

“...ini rapat kordinasi secara rutin dan mereka membuat laporan terkait dengan program yang sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan diadakan rapat kordinasi.”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama AM dan MB bahwasannya komunikasi antar pemerintah dan instansi yang terkait dengan program desa terpadu mandiri. Namun berbeda dengan informan SRN (camat bone-bone) yang mengatakan:

“...tidak adaji karena masyarakat sibuk bertani”

Kemudian pernyataan SRN di dukung dengan pernyataan dari MP yang mengatakan:

“...itu lembaga-lembaga sosial antar masyarakat, ee tidak sejalan juga yaa kalau memang itu ada yang tidak menginginkan itu di musyawarahkan bersama, di musyawarahkan bersama.”

Jadi pernyataan dari SRN dan MP yakni komunikasi antar sesama pemerintah di desa itu tidak ada, dikarenakan tidak ada lembaga dan masyarakat yang sibuk hingga tidak adanya lembaga desa yang dijalankan. Kemudian pernyataan diatas di dukung oleh STO (kades sukaraya) yaitu menyatakan :

“...melalui komunikasi saling memberikan informasi dan dalam memecahkan masalah harus secara bersama”

Kemudian pernyataan dari STO senanda dengan yang dikemukakan oleh IH yang mengatakan:

“...kalau untuk proses komunikasi sesama organisasi yaitu yang heran saya karena hanya ada satu organisasi di desa ini yaitu karang taruna itupun karang taruna desa ini yaa tidak terlalu aktif”

Jadi berdasarkan hasil wawancara yang ada bahwasannya komunikasi antar sesama unit instansi pemerintah hanya dilakukan pada tingkatan daerah saja, pada tingkatan desa tidak ada komunikasi sesama unit hanya saja semua keputusan yang akan diambil selalu di dasari dengan komunikasi baik itu secara bermusyawarah.

- c. Pada tabel yang merujuk pada indikator saluran komunikasi, yang mana dalam hal ini adalah proses komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama AM (sekda) yang mengatakan:

“...pemberitahuan ke masyarakat itu melalui tempat-tempat umum baik itu tempat ibadah maupun pertemuan-pertemuan”

Namun berbeda dengan yang di katakan oleh AM, MB (kadis PMD) mengatakan demikian yakni:

“...ini rapat kordinasi secara rutin dan mereka membuat laporan terkait dengan program yang sudah dilaksanakan ataupun belum dilaksanakan diadakan rapat kordinasi”

Jadi berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh informan diatas yakni AM dan MB yang berbeda bahwasannya komunikasi yang diberikan kepada masyarakat juga berdasarkan kordinasi-kordinasi, namun yang dikatakan oleh AM senada dengan yang di katakan oleh SRN (camat bone-bone) yakni:

“...aparap desa disampaikan melalui tempat-tempat pertemuan atau kegiatan-kegiatan seperti di posyandu juga melalui pengumuman-pengumuman di masjid. dan sering di undang untuk ee adakan pertemuan di kantor desa di undang oleh masyarakat setiap dusun mewakili masyarakat, ee jadi ada perwakilan yang di undang setiap dusun di targetkan oleh berapa orang yang mewakili dusun masing-masing.”

Selanjutnya dari hasil wawancara AM dan SRN juga senada dengan yang dikatakan oleh MP :

“...ya lewat, Informasi itu kan dari desa sendiri juga kemudian disampaikan bukan hanya ditempat-tempat rapat, di masjid, di mushollah disampaikan bahwa desa wonokerto ini termasuk desa ee desa apa, desa pelopor membangun desa.”

Namun dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa masyarakat salah satunya informan yang berinisial HS (masyarakat) yang mengatakan:

“tidak dek, belum peka pernah dengar ada sosialisasi-sosialisasi program yg kita sebut tadi dikantor desa atau di balai desa bersama masyarakat, atau mungkin belum ya”

Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara pada indikator saluran komunikasi yakni, komunikasi yang ada pada program desa mandiri terpadu sama sekali tidak ada, dikarenakan dari hasil wawancara diatas menyebutkan

bahwasannya telah melakukan sosialisasi, telah melakukan komunikasi diberbagai tempat, namun pada kenyataannya masyarakat tidak tahu seperti apa itu desa terpadu mandiri, dan tidak ada informasi yang sampai kemasyarakat akan program desa terpadu mandiri, terkait komunikasi antar lembaga pun hanya dilakukan pada pemerintah daerah saja, komunikasi antar instansi pada pemerintah desa tidak melakukan dikarenakan tidak ada instansi yang ada dipemerintah desa berjalan dengan baik.

### **3. Jangka Waktu**

jangka waktu adalah elemen ketiga dalam proses difusi. Banyak perilaku lain dalam penelitian tersebut dimensi waktu hanya hanya diabaikan. Inklusi dari jangka waktu adalah variabel dalam penelitian difusi salah satu kekuatan, tetapi pengukuran dari dimensi waktu ( sering dengan cara mengingat responden) dimensi jangka waktu adalah dilibatkan dalam difusi (1) proses pengambilan keputusan dalam inovasi dari individu yang pertama melewati pengetahuan inovasi adopsi atau penolakan, (2) dalam inovasi dari seorang individu atau unit adopsi-relatif cepat/lambat dengan adopsi inovasi-dibandingkan dengan anggota sebuah sistem dan (3) dalam jaringan inovasi dari adopsi sistem, biasanya di ukur dengan berapa banyak anggota dalam sistem adopsi tersebut adopsi inovasi dan diberi jangka waktu.

**Tabel 2.4**  
**Difusi Inovasi Desa Mandiri Terpadu**

NO	Informan	Indikator Jangka Waktu
1.	Sekertaris Daerah	a. Dilakukan secara integreated hingga cepat selesai. b. Tidak ada penolakan c. Waktu di sesuaikan dengan instansi terkait.
2.	Kepala Dinas PMD	a. Target program yakni 3 tahun b. Penentuan keputusan 1 tahun c. terjadi penolakan

(sumber : Hasil reduksi data 2018)

- a. Berdasarkan tabel 3 diatas merujuk pada proses adopsi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap program desa terpadu mandiri, berdasarkan informan AM (Sekda) mengatakan:

“...adopsi inovasi inikan sebenarnya tidak lama asal dikeroyok inovasi itukan penyelesaiannya itu secara adaptif, kalau ada masalah intinya harus diselesaikan secara integreated terpadu sehingga cepat selesai untuk menjadikan desa mandiri apa misalnya mandiri pangan, saya kira hanya butuh waktu 1 tahun.”

Selanjutnya senada dengan yang dikatakan oleh AM, MB (kadis Pmd) juga mengatakan hal demikian:

“...ini berapa lamanya ini sebetulnya kita targetkan paling 3 tahun di harap program, tapi sebetulnya 3 tahun kita akan evaluasi apakah bisa selesai atau tidak.”

Jadi proses adopsi desa terpadu mandiri ini tidak memakan waktu yang lama untuk di gunakan sebagai desa mandiri terpadu dengan catatan dalam

pengerjaannya dilakukan secara keroyok, dan diharap dalam kurun waktu 3 tahun hasilnya sudah dapat di evaluasi.

- b. Dalam tabel 3 diatas menunjukkan waktu yang di gunakan dalam proses pengambilan keputusan untuk desa mandiri terpadu, berdasarkan informan AM (sekda) mengatakan bahwa :

“... saya kira kalau waktu tidak masalah tinggal kita menselaraskan dengan instansi terkait kalau itu sudah sepakat kapan kita lakukan tidak ada masalah.”

Selanjutnya pernyataan AM juga senada dengan pernyataan dari MB (kadis PMD) yang mengatakan :

“...kalau kemarin itu untuk menentukan desa terpadu mandiri itu tidak lebih dari 1 tahun”

Jadi dari hasil wawancara oleh kedua informan diatas bahwasannya dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah daerah terkait program desa terpadu mandiri hanya perlu waktu yang sebentar dalam kurun waktu 1 tahun, pemerintah mampu untuk mengambil keputusan di gunakannya program desa mandiri terpadu.

- c. Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwasannya pada program desa terpadu mandiri tidak adanya penolakan berdasarkan informan AM (sekda) yang mengatakan :

“kalau untuk penolakan itu tidak ada ya, semua dikordinasikan secara baik saya kira itu tidak ada masalah”

Namun berbeda dengan yang di kemukakan oleh AM, MB (kadis PMD) mengatakan bahwasannya:

“...pernah, jadi khusus untuk desa mario itu awalnya dia tolak, tapi setelah kita beri penjelasan bahwa ketika saudara di tunjuk jadi desa terpadu mandiri itu adalah keuntungan desa itu sendiri. Karena kalau dia tidak jadi desa terpadu mandiri beda dengan desa lain, kalau desa lain itu yaa tergantung dari SKPD itu mau dikasi atau tidak, kalau dia desa terpadu mandiri itu kita wajibkan seluruh SKPD dimasukkan. Pendidikan masuk, kesehatan masuk, PU masuk, pokoknya semua masuk.”

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh kedua informan AM dan MB, tidak adanya komunikasi antar pemerintah daerah yang bertugas untuk menjalankan ataupun mengawal desa terpadu mandiri dengan pejabat daerah yang seharusnya mengetahui semua program yang di adakan khususnya program yang langsung diberlakukan oleh bupati.

Jadi kesimpulannya berdasarkan semua wawancara yang dilakukan pada keseluruhan indikator jangka waktu bahwasannya, keputusan yang diambil oleh pemerintah luwu utara dalam menetapkan program desa terpadu mandiri sebagai *pilot project* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun sebelum berjalannya program tersebut sempat terjadi penolakan namun dapat di atasi dengan baik, serta pada proses adaptasi pada program desa terpadu mandiri mampu di selesaikan denagan waktu kurun 1 tahun, dan waktu tidak mempengaruhi seberapa lama keputusan diambil.

#### **4. Sistem Sosial**

Defenisi sistem sosial adalah sebuah hal yang saling terkait pada unit, di dalamnya memecahkan masalah untuk mencapai tujuan bersama. Anggota

atau unit dari sistem sosial mungkin perorangan, kelompok informal, organisasi, dan subsistem.

Terjadi difusi dengan sosial sistem, struktur sosial dalam sistem mempengaruhi difusi inovasi dalam beberapa cara. Sistem sosial merupakan batas dengan difusi inovasi. Kita sepakat dengan bagaimana struktur sistem sosial mempengaruhi difusi, efeknya norma pada difusi, peran pemimpin opini dan agen perubahan. Tipe inovasi-keputusan, dan konskuensi dari inovasi, masalah ini melibatkan hubungan antara sistem sosial dan proses terjadinya difusi dengan itu

**Tabel 2.5**  
**Difusi Inovasi Desa Mandiri Terpadu**

No	Informan	Indikator Sistem Sosial
1.	Sekertaris Daerah	a. Masyarakat, dan lembaga desa b. Menyesuaikan dengan kebudayaan setempat dan kearifan lokal. c. Peran pemimpin yang proaktif dan leadership, dan berkomitmen. d. Beberapa program sudah dilaksanakan.
2.	Kepala Dinas PMD	a. Pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. b. Berdasarkan asas kearifan lokal pada masyarakat c. Pemimpin yang sangat mendukung d. Agen perubahan siap dan mendampingi untuk percepatan desa mandiri.

(Sumber: Hasil Reduksi Data 2018)

- a. Pada tabel merujuk kepada siapa sasaran inovasi desa terpadu mandiri, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama informan AM (sekda) mengatakan bahwasannya sasaran inovasi yakni:

“...tentu masyarakat, kemudian lembaga, misalnya disitu ada BUMDes, dan lain lain.”

Kemudian senada dengan yang di katakan oleh informan AM, informan MB (kadis Pmd) mengatakan bahwasannya sasaran dari inovasi tersebut adalah :

“...kalau yang pertama, pemerintah desa itu sendiri. Kemudian kedua lembaga kemasyarakatan yang ada di desa kemudian ketiga lembaga-lembaga kepemudaan, dan yang pastinya seluruh masyarakat yang ada di desa.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas program desa terpadu mandiri ini memang di sasarkan kepada masyarakat desa, dan juga bagi pemerintah desa untuk mampu mandiri serta lembaga-lembaga yang ada di desa mampu bergerak sendiri.

- b. Pada tabel di atas merujuk kepada seperti apa kesesuaian inovasi tersebut dengan kepercayaan yang ada di masyarakat, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh AM (sekda) mengatakan :

“...kalau disanakan daerah transmigrasi jadi kita mengikut dan menyesuaikan dengan kebudayaan masyarakat disana berlandaskan kearifan lokal .”

Senada dengan yang dikatakan AM, MB (kadis pmd) juga mengatakan hal yang sama bahwasannya :

“...yang pertama kita menganut asas nilai-nilai kearifan lokal jadi kalau dia dominan orang jawa maka itu yang harus kita perhatikan kemudian, kedua kesesuaian program itukan berawal dari musyawarah dusun, ada namanya musdus, kemudian dari hasil musdus itu naik menjadi musyawarah tingkat desa dan kecamatan dan bahkan di kabupaten tapi yang paling inti adalah menganut asas-asas kearifan lokal.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kedua informan diatas maka dapat dilihat program desa terpadu mandiri mengikuti asas-asas kearifan lokal yang mana berdasarkan nilai-nilai masyarakat setempat.

- c. Pada tabel diatas merujuk kepada peran pemimpin pada inovasi desa terpadu mandiri, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama AM (sekda) mengatakan bahwasannya :

“...peran pemimpin dia harus proaktif kemudian dia harus punya leadership dia harus seni untuk memimpin intinya dia harus kokoh punya komitmen dan kompetensi.”

Senada dengan yang dikatakan oleh AM, MB (kadis pmd) juga mengatakan hal demikian yakni :

“...pemimpin sangat konsen, sangat mendukung khusus untuk tingkat kabupaten itu kabupaten mengeluarkan peraturan bupati kemudian di tingkat desa bahkan di provinsi juga sudah berapa kali pelatihan jadi itu peran di tingkat provinsi mengundang ini desa terpadu mandiri di latih untuk di bina dan di bimbing bagaimana langkah-langkah kerja.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada kedua informan dapat dilihat bahwasannya peran pemimpin sangat dibutuhkan, pemimpin harus kuat dalam berkomitmen dan juga konsen serta mendukung segala program kerja pada desa terpadu mandiri.

- d. Pada tabel diatas merujuk kepada pengaruh agen perubahan dalam terwujudnya desa terpadu mandiri di kabupaten luwu utara, berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama AM (sekda) mengatakan bahwa:

“...saya kira ini beberapa orang yg terkait program sudah ada semua di sana misalnya dari kesehatan adan pertanian semua sudah ada disana yang merupakan agen of changes”

Selanjutnya pernyataan tersebut di dukung oleh MB (kadis pmd) yang mengatakan :

“...jadi agen perubahan di dalam itu ada namanya KPN kader pemberdayaan masyarakat, kemudian disana juga ada pendamping profesional ada pendamping lokal desa PLD, kemudian ada namanya pendamping desa tingkat kecamatan tapi yang pasti keberadaan agen-agen perubahan ini sangat mendukung percepatan pencapaian desa terpadu mandiri”

Berdasarkan dari hasil keseluruhan wawancara pada indikator sistem sosial ini, bahwasannya sasaran pada program desa terpadu mandiri ini adalah masyarakat desa serta aparat desa itu sendiri, kemudian program desa terpadu mandiri ini berdasarkan asas-asas kearifan lokal, serta peran pemimpin dalam berjalannya inovasi ini sangat dibutuhkan komitmen yang tinggi dan kuat, dan kemudian peran *agen of change* juga dibutuhkan dalam membantu mempercepat jalannya program desa terpadu mandiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP.**

#### **A. Kesimpulan**

1. Jadi berdasarkan keseluruhan wawancara yang telah di paparkan pada indikator inovasi dalam program desa terpadu mandiri, masih sangat kurang, khususnya dalam kordinasi antar sesama pemerintah terkait, baik itu antara pemerintah daerah dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa sebagai motor penggerak dari program desa terpadu mandiri, kemudian terkait dengan hambatan yang di alami oleh pemerintah yakni masih kurangnya sumberdaya manusia dan pengetahuan serta keterampilan aparat desa dalam mengolah program desa terpadu, dan juga masih kurangnya pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada aparat desa. sehingga penerapan dan kesesuaian dari inovasi desa mandiri terpadu menjadi kurang dan bahkan tidak berjalan dikarenakan kurangnya kordinasi antara pemerintah terkait.
2. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara pada indikator saluran komunikasi yakni, komunikasi pada program desa mandiri terpadu sama sekali tidak ada, dikarenakan dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwasannya telah melakukan sosialisasi, serta telah melakukan komunikasi diberbagai tempat, namun pada kenyataannya masyarakat tidak tahu seperti apa itu desa terpadu mandiri, dan tidak ada informasi yang sampai kemasyarakat akan program desa terpadu

mandiri, dan terkait komunikasi antar lembaga pun hanya dilakukan pada pemerintah daerah saja, komunikasi antar instansi pada pemerintah desa tidak dilakukan dikarenakan tidak ada instansi yang ada dipemerintah desa berjalan dengan baik.

3. Jadi kesimpulannya berdasarkan semua wawancara yang dilakukan pada keseluruhan indikator jangka waktu bahwasannya, keputusan yang diambil oleh pemerintah luwu utara dalam menetapkan program desa terpadu mandiri sebagai *pilot project* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun sebelum berjalannya program tersebut sempat terjadi penolakan namun dapat di atasi dengan baik, serta pada proses pengambilan keputusan untuk program desa mandiri terpadu mampu di selesaikan dengan waktu kurun 1 tahun, dan waktu tidak mempengaruhi seberapa lama keputusan diambil.
4. Berdasarkan dari hasil keseluruhan wawancara pada indikator sistem sosial ini, bahwasannya sasaran pada program desa terpadu mandiri ini adalah masyarakat desa serta aparat desa itu sendiri, kemudian program desa terpadu mandiri ini berdasarkan asas-asas kearifan lokal, serta peran pemimpin dalam berjalannya inovasi ini sangat dibutuhkan komitmen yang tinggi dan kuat, dan kemudian peran *agen of change* juga dibutuhkan dalam membantu mempercepat jalannya program desa mandiri terpadu tanpa merubah nilai-nilai kearifan lokal

**B. Saran**

1. Di harapkan agar pemerintah daerah melakukan kordinasi yang baik, baik itu kepada pemerintah kecamatan dan juga pemerintah desa dalam berjalannya desa mandiri terpadu.
2. Di harapkan pemerintah daerah turun langsung dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa dalam membantu mempercepat jalannya program desa mandiri terpadu
3. Di harapkan pemerintah dalam proses pengambilan keputusan melibatkan seluruh instansi pemerintah yang terkait dalam program desa mandiri terpadu.
4. Di harapkan peran pemimpin dalam program desa mandiri terpadu lebih memiliki komitmen dan kuat dan tinggi dalam mempercepat jalannya program desa mandiri terpadu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulllah Ramadhani & Muhammad Ali Ramadhani. 2017 Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik
- Analisis Kebijakan Publik (cetakan IV), 2010. Pustaka Pelajar. Jogjakarta
- Anggreany Cindy, 2013. Inovasi Pelayanan Kesehatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan di Puskesmas Jagir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol. 1, No.1.
- Everett M, Rogers. 1995. *Diffution of innovation (fourth edition)*. New York: Free pass
- E-journal.Uajy.ac.id/4774/3/2MM01745.pdf. di akses 20 Februari 2018
- Hany F. Eva, 2015. Public Service of Surabaya Immigration Office Special Class I by Margorejo Passport Service Unit (ULP) In Surabaya Maspion Square Mall.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Laporan Peranggungjawaban desa wonokerjo Tahun 2017
- Mei M, Rina, 2013. Inovasi Pelayanan Publik UPTD Terminal Purabaya-Bungurasih. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*. Vol.1 No.1.
- Mulyono, Agus. 2008 Tesis. Studi Partisipasi Masyarakat Pada Program Desa Terpadu Mandiri Pangan Desa di Muntuk Kabupaten Bantul.
- Nawawi Ismail, 2009. *Public Policy analisis, strategi dan advokasi Teori dan Praktek* Cv. Putra Media Nusantara. Surabaya.
- Rizal Fahrul, 2012. Penerapan Teori Difusi Inovasi dalam Perubahan Sosial Budaya. Vol. VI, No.1
- sukaraya.luwuutarakab.go.id/blog/page/potensi-desa-2018. Diakses 12 Desember 2018
- Soetomo. 2006. Strategi- Strategi Pembangunan Masyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Surat Edaran pemerintah kabupaten luwu utara No:50/120/Pem-MM-Bappeda/2017 Perihal: Penyampaian tentang Paelop Proyek Desa Mandiri

*Terpadu (Desa Sukaraya Kecamatan Bone-Bone, Desa Wonokerjo  
Kecamatan Sukamaju, Desa Mario Kecamatan Baebunta.*

Yogi, Suwarno. 2008. *Inovasi Di Sektor Publik*. Jakarta: STIA-KAN Press.

Zainal A. Said, 2004. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah. Jakarta .



Wawancara bersama Sekertaris Daerah Luwu Utara



Wawancara bersama Kepala Dinas PMD Luwu Utara



Wawancara bersama Camat Bone-Bone



Wawancara bersama Camat Sukamaju



Wawancara bersama kepala desa sukaraya



Wawancara bersama Kepala desa Wonokerto

## BIODATA PENELITI



**Fera Juliana Fajar** dilahirkan di Kota Makassar pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli tahun 1996. Anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Fajar Yande Siwa S.E dan Ibu Dra. Erna Mustafa memiliki 1 saudara perempuan yang bernama Farah Juliani Fajar dan dua saudara laki-laki yang bernama Muhammad Fahmi Fajar, dan Muhammad Fadil Fajar. Peneliti masuk sekolah dasar di SDN 187 Bone-Bone di Kabupaten Luwu utara kemudian pindah dan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 1 Mamajang Kota Makassar dan lulus pada tahun 2008 kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Makassar kemudian pindah ke SMP Negeri 1 Bone-Bone Kabupaten Luwu utara lulus pada tahun 2011 dan melanjutkan pendidikan di tahap selanjutnya pada SMA Negeri 1 Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2014. Pada tahun 2014 peneliti melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dengan ketekunan hingga motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, peneliti telah berhasil menyelesaikan pekerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penelitian tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan khususnya dalam pengembangan disiplin Ilmu Administrasi Negara. Akhir kata peneliti mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “Difusi Inovasi Desa mandiri terpadu (Studi kasus: Desa mandiri terpadu di Kabupaten Luwu Utara)”